



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN KOTO TINGGI NO. 9 PADANG

📞 0751 841584

🌐 dkp.sumbarprov.go.id

📍 Jalan Koto Tinggi No.9 Padang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan sistem akuntabilitas organisasi yang wajib untuk disampaikan dan dapat dipertanggung



jawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang kelautan dan perikanan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara produktif, efektif dan efisien sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Padang, Januari 2026

Kepala Dinas



SYEFDINON, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720713 199803 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja (keberhasilan dan kegagalan) yang berdasarkan pada pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi LKjIP/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun sebelumnya dan menjadi Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan
4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan
5. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. Target di tahun 2025 adalah 1,11% terealisasi sebesar 1,20% dengan capaian 108,11% (Sangat Tinggi).
2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Target 0,51% terealisasi sebesar 0,51% dengan capaian 100% (Sangat Tinggi).
3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai ekspor Hasil Perikanan. Target nilai ekspor hasil perikanan 160 Milyar terealisasi sebesar 80 Milyar dengan capaian 50% (Sangat Rendah).



4. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan. Target 2,05% terealisasi sebesar 2,15% dengan capaian 104,88% dengan demikian capaian ini Sangat Tinggi.
5. Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Target capaian kinerja 64,71% terealisasi sebesar 59,74% dengan capaian 92,32% dengan demikian capaian ini Sangat Tinggi.
6. Capaian sasaran strategis 6 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Target capaian kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD A (80,54) terealisasi sebesar 81,47 dengan capaian 101,15% dengan demikian capaian ini telah melampaui target (Sangat Tinggi).
7. Capaian sasaran strategis 7 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Target capaian kinerja yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi B (84) terealisasi sebesar B (85) dengan capaian 101,19% dengan demikian capaian ini Sangat Tinggi.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
 - a. Tekanan penangkapan berlebih (overfishing) pada beberapa komoditas.
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan yang masih terbatas, terutama di wilayah perairan terpencil.
2. Perubahan iklim dan kerentanan ekosistem.
 - a. Abrasi pantai yang meningkat di pesisir Sumatera Barat.
 - b. Dampak pemanasan laut terhadap terumbu karang, padang lamun, dan lokasi pemijahan ikan.
 - c. Cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas nelayan dan pembudidaya.
3. Hilirisasi dan Daya Saing Produk Perikanan
 - a. Rendahnya nilai tambah (value added) karena sebagian besar produk masih dijual segar.
 - b. Kualitas dan standar keamanan pangan (food safety) belum merata.



- c. Akses pasar domestik dan ekspor yang belum optimal.
- 4. Tata Kelola dan Pengawasan Pesisir & Laut
 - a. Penataan ruang laut yang perlu terus disempurnakan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang.
 - b. Pengawasan IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated) yang masih perlu diperkuat.
 - c. Pengelolaan kawasan konservasi laut yang memerlukan sumber daya manusia dan pendanaan lebih besar.
- 5. Penguatan Sektor Budidaya Perikanan
 - a. Tantangan penyakit ikan dan kualitas pakan yang mahal.
 - b. Ketersediaan benih unggul yang masih terbatas.
 - c. Optimalisasi potensi budidaya laut (marikultur), termasuk keramba jaring apung lepas pantai.

Untuk masa yang akan datang hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasaran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih baik lagi.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
I. PENDAHULUAN	7
1.1 Gambaran Organisaasi	7
1.2 Aspek Strategis Organisasi	23
1.3 Permasalahan Utama (strategic issued)	24
II. PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Tujuan dan Sasaran	27
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	36
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	37
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.4 Realisasi Anggaran	165
a. Realisasi Anggaran APBD	165
b. Realisasi Anggaran APBN	171
IV. PENUTUP	172
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Esselon II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	
2. Data Dukung Sasaran Strategis	



01

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan.
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Menyelenggarakan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas



- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Program

Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Aset) dan Fungsional Perencana Ahli Muda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. **Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PRL PSDKP)**

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;



- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Mitra Konservasi;
- i. Pelaksanaan pengawasan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan



pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Tangkap sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Tangkap;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/Kelompok Nelayan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Perikanan Tangkap;
- h. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Perikanan Tangkap;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan perairan umum daratan;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;



- m. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- n. Pelaksanaan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Budidaya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Budidaya;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan budidaya dan penyiapan dokumen rencana budidaya, penyiapan batas kawasan budidaya;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan budidaya;



- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pembudidaya;
 - h. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pembudidaya ikan;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
 - k. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
 - l. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - m. Pelaksanaan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
 - n. Pelaksanaan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
 - o. Pelaksanaan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - p. Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
 - q. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- 6. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan (PDSKP)**
- Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;



- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
- f. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- i. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- j. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan ;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan dan penyiapan dokumen rencana Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- n. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat;
- p. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.



Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (PPW I)
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (PPW II)
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (PPW III)
- e. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)
- f. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

7.1 UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau

Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis Produksi;
- d. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan
- b. Pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pembenihan
- c. Pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan



- g. Pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2 UPTD Pelabuhan Perikanan

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan;
- d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan
- e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada UPTD; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan, meliputi :

1. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I berkedudukan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.



Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kabupaten Pesisir Selatan,
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih Kabupaten Pesisir Selatan,
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai Kota Padang.
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman,
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kabupaten Agam,
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III berkedudukan di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.

7.3 UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Konservasi
- d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



mempunyai fungsi :

- c. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan Umum Danau Singkarak;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.4 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian Mutu
- d. Seksi Penerapan Mutu dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu hasil perikanan.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

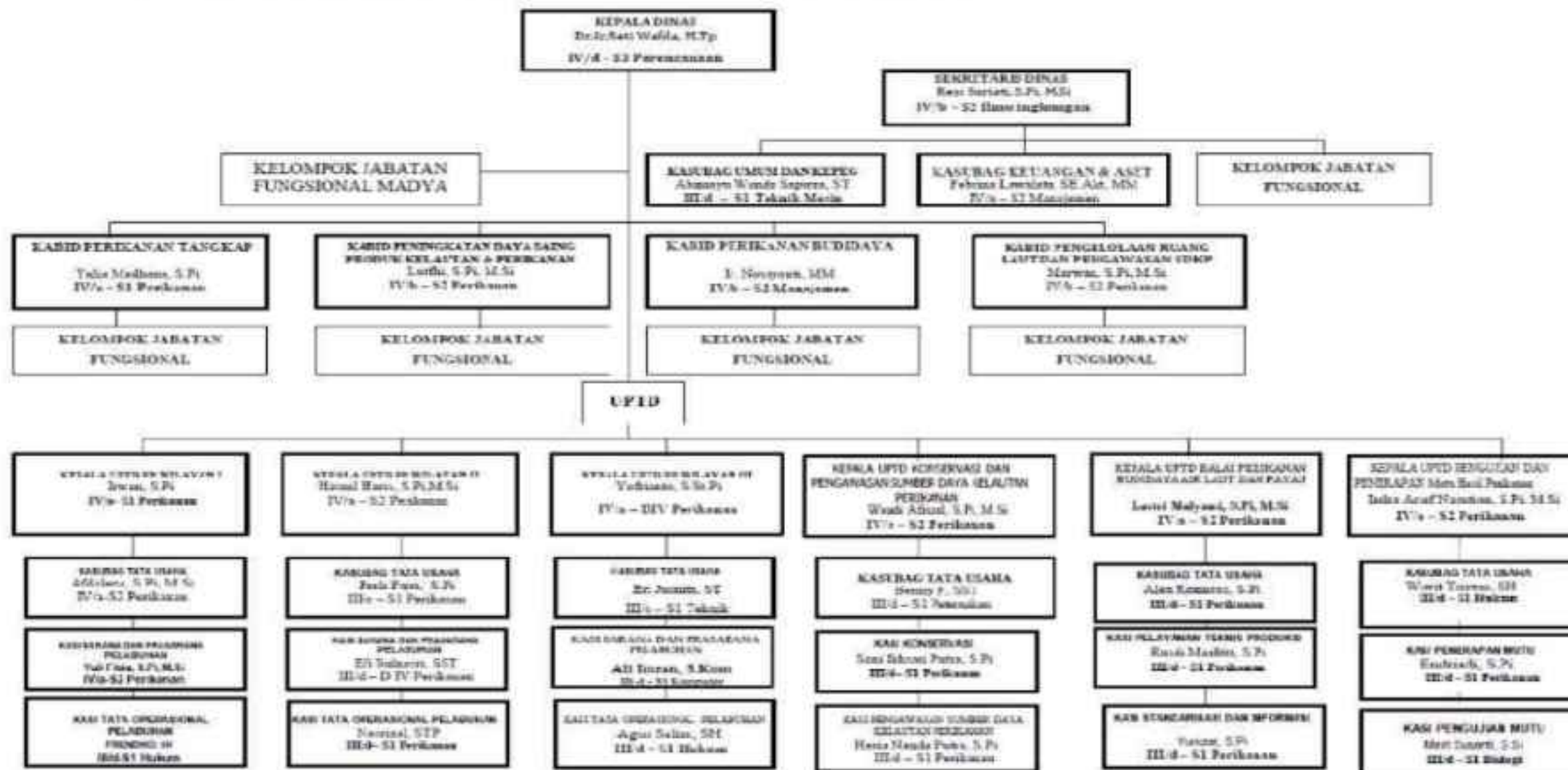
- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan
- b. Pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan



- c. Pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium mutu hasil perikanan
- f. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD
- g. Pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



c. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat





d. Sumberdaya Manusia (SDM)

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung dengan jumlah pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekap Data PNS dan Non PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat keadaan : Desember Tahun 2025

NO	URAIAN GOLONGAN	PNS	CPNS	PPPK
1	GOL IV	16	0	0
2	GOL III	95	11	9
3	GOL II	18	6	1
4	GOL I	2	0	0
	JUMLAH	131	17	10
	JUMLAH KESELURUHAN	158		

NO	PENDIDIKAN	PNS	CPNS	PPPK
1	S3	1	0	0
2	S2	25	0	0
3	S1	68	11	8
4	DIV	6	0	1
5	DIII	8	2	1
6	SLTA	20	4	0
7	SLTP	2	0	0
8	SD	1	0	0
	JUMLAH	131	17	10
	TOTAL KESELURUHAN	158		



NO	JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	PPPK
1	LAKI-LAKI	72	7	3
2	PEREMPUAN	59	10	7
	JUMLAH	131	17	10
	JUMLAH KESELURUHAN	158		

NO	URAIAN	PEGAWAI NON ASN		
	JENIS KELAMIN	TENAGA HONORER KEGIATAN	OUTSOURCING	SUMBER DANA
1	LAKI-LAKI	51	55	APBD
2	PEREMPUAN	12	11	APBD
	JUMLAH	63	66	
	JUMLAH KESELURUHAN	129		

NO	URAIAN	PNS	PPPK
1	JF MADYA	-	-
2	JF MUDA	12	-
3	JF PERTAMA	2	9
4	JF TERAMPIL	0	1
	JUMLAH	14	10
	JUMLAH KESELURUHAN	24	



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat untuk mencapai visi misi Gubernur terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

Sumatera Barat terdiri dari 19 Kab/Kota, memiliki potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda perekonomian di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 Km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 2.299,08 Km, 218 pulau-pulau kecil dan 3 pulau kecil terluar.

Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah dengan luas keseluruhan 27.511 Ha. Ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di daerah pantai.

Peran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sesuai dengan tugas pokok fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung ke **Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**. Dukungan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui 6 fungsi strategis yaitu :

1. Menjalankan fungsi strategis Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Menjalankan fungsi strategis Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Menjalankan fungsi strategis Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. Menjalankan fungsi strategis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Menjalankan fungsi strategis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue) Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan/tantangan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Terbatasnya Sarana dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap.
Nelayan di Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan teknologi perikanan tangkap. Sebagian besar alat tangkap yang digunakan masih bersifat tradisional, mengurangi efisiensi dan potensi hasil tangkapan. Penerapan teknologi modern seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan alat tangkap ramah lingkungan belum sepenuhnya diadopsi, membatasi daya saing produk perikanan daerah.
2. Terbatasnya Sarana dan Penguasaan Teknologi Perikanan Budidaya.
Keterbatasan fasilitas seperti tambak dan keramba yang memadai, serta kurangnya akses terhadap teknologi budidaya modern, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya. Hal ini berdampak pada



rendahnya daya saing produk budidaya lokal di pasar domestik maupun internasional.

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.

Infrastruktur pelabuhan perikanan yang ada saat ini masih terbatas dan belum optimal. Fasilitas seperti dermaga, cold storage, dan sistem distribusi yang efisien masih kurang, menyebabkan pemborosan hasil tangkapan dan keterlambatan dalam distribusi ke pasar. Peningkatan kapasitas dan modernisasi pelabuhan perikanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran rantai pasok perikanan.

4. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Benih dan Calon Induk untuk Budidaya Laut dan Payau.

Ketersediaan benih dan calon induk ikan berkualitas masih terbatas, menghambat ekspansi usaha budidaya laut dan payau. Kurangnya fasilitas pembenihan dan program pembenihan unggul mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang tidak selalu stabil dan berkualitas.

5. Rendahnya Kemampuan Manajerial Usaha dan Kualitas Kelembagaan Usaha.

Sebagian besar pelaku usaha perikanan di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen usaha dan kelembagaan. Kurangnya pelatihan dalam aspek manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan menyebabkan usaha perikanan sulit berkembang dan bersaing. Penguatan kelembagaan usaha melalui pembentukan kelompok usaha dan koperasi perikanan perlu menjadi prioritas.

6. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan Hasil Perikanan.

Potensi pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya fasilitas pengolahan yang memenuhi standar, serta keterbatasan dalam akses pasar dan pemasaran produk olahan, menghambat potensi ekonomi sektor ini. Peningkatan kapasitas industri pengolahan dan diversifikasi produk olahan perlu didorong untuk meningkatkan daya saing.

7. Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan.

Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan jaring trawl, masih terjadi di beberapa wilayah. Kegiatan ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber



daya ikan. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya praktik penangkapan yang berkelanjutan sangat diperlukan.

8. Degradasi Ekosistem Laut dan Pesisir.

Kerusakan ekosistem laut dan pesisir, seperti terumbu karang dan mangrove, akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, semakin mengkhawatirkan. Degradasi ini mengurangi kapasitas alam dalam mendukung kehidupan dan kegiatan perikanan. Upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem perlu ditingkatkan melalui program restorasi dan pengelolaan berbasis masyarakat.

9. Pemanfaatan Lahan Usaha Perikanan yang Tidak Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.

Masih terdapat pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan konflik ruang dan kerusakan lingkungan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penataan ruang dan izin usaha perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Menghadapi isu-isu strategis tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang mengedepankan pengembangan ekonomi biru, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur serta kelembagaan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.



PERENCANAAN KINERJA

02



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Sumatera Barat. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program supaya mampu eksis dan unggul dan bersaing semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1. Tujuan dan Sasaran OPD

a. Tujuan

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah : *"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"*. Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dalam 1 misi yaitu :

Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka **Tujuan** jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Pendapatan dengan indikator tujuan yaitu :*

1. Pendapatan Pembudidaya Ikan
2. Pendapatan Nelayan

2. *Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dengan indikator tujuan :*

1. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan

3. *Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan yaitu:*

1. Nilai Akuntabilitas kinerja
2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi



Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan Rp/org/th	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan Rp/org/th	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan
2.	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan perairan	1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

b. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.



4. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan indikator kinerja
 - Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan.
5. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan dengan indikator kinerja
 - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi :
 - Nilai akuntabilitas Kinerja : A
7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi
 - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Secara lengkap, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta target 5 tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis OPD dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Jumlah Pendapatan Nelayan --- Rp/org/th			Rp.	39.995.000	40.795.000	41.611.000	42.443.000	43.292.000	44.158.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan --- Rp/org/th			Rp.	45.800.000	47.175.000	48.590.000	50.048.000	51.549.000	53.096.000
			2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
			3. Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	153,76	155,50	156,85	158,42	160	161,60
			4. Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6,30	6,49	7,26	7,95	8,05	11



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke..				
							2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan perairan			%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
			1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja			Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (80,10)	A (80,12)	A (80,15)	A (80,16)	A (80,18)	A (80,20)
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)
			3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	B (81,50)	B (82)	B (82,5)	B (83)	B (84)	B (85)



2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tabel 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,11 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	160
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,05 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	64,71 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,54)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (84)



No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.912.453.961,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	448.614.745,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.151.355.724,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.707.290.858,-	APBD
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	452.204.850,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	794.015.760,-	APBD
	JUMLAH APBD	44.465.935.898,-	
7.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	7.700.000,-	APBN – TP
	JUMLAH APBN	7.700.000,-	
	JUMLAH APBD + APBN	44.473.635.898,-	

Poin-poin yang dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah target indikator kinerja sasaran strategis 2 dan sasaran startegis 4 yaitu :

1. Sasaran strategis 2 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang semula 3,78% menjadi 0,51%.

Alasan dilakukannya perubahan pada target indikator (penurunan) karena berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan III, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan target awal tahun 2025, terlebih di Triwulan IV tepatnya pada bulan November 2025 terjadi banjir bandang bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Barat yang sangat berdampak bagi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota berdampak signifikan terhadap kegiatan perikanan budidaya. Curah hujan tinggi, banjir, dan longsor menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana budidaya seperti kolam budidaya, tambak, serta saluran irigasi.



Kondisi tersebut mengakibatkan ikan budidaya siap panen hanyut, terganggunya sistem pengelolaan air, serta menurunnya kualitas air akibat pencemaran lumpur dan bahan organik. Selain itu, perubahan kualitas air secara ekstrem memicu stres dan kematian massal ikan di sejumlah lokasi budidaya, sehingga menurunkan volume produksi secara nyata. Kerusakan infrastruktur pendukung perikanan pascabencana menyebabkan proses pemulihan usaha budidaya berjalan lambat. Hal ini berdampak pada menurunnya siklus produksi dan berkurangnya jumlah panen dalam periode pelaporan. Secara keseluruhan, kondisi tersebut berkontribusi terhadap penurunan data produksi perikanan di Sumatera Barat.

2. Sasaran strategis 4 Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan yang semula 8,05% menjadi 2,05%.

Alasan dilakukannya perubahan pada target indikator (penurunan) karena berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan III, realisasinya masih sangat jauh dari target. Penurunan produksi olahan di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di bidang pengolahan, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

Faktor Internal

1. Keterbatasan bahan baku yang disebabkan oleh pasokan bahan baku yang tidak stabil yang bergantung pada cuaca dan musim.
2. Permintaan terhadap ikan segar cukup tinggi keluar daerah sehingga pasokan ikan untuk produk olahan sedikit berkurang dan terbatas menyebabkan harga bahan baku tinggi.
3. Modal usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) terbatas sehingga sulit untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar dan harga yang naik dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu serta masih lemahnya kemampuan finansial pengolah dan masih minimnya penerapan inovasi produk olahan.
4. Jumlah tenaga kerja dan keterampilan pengolah yang kurang sehingga manajemen UPI lemah, inovasi produk rendah, kurang inovatif dan variatif.



Faktor Eksternal

1. Target produksi yang telah ditetapkan di awal terlalu tinggi sangat jauh dari produksi olahan di lapangan.
2. Pertumbuhan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sangat sedikit setiap tahunnya, hanya berkisar 2-7 UPI pertahun, dikarenakan pembinaan terhadap pelaku usaha terfokus pada nelayan dan pembudidaya.
3. Permintaan pasar menurun karena daya beli masyarakat kurang dan masih minimnya animo masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan perikanan dibandingkan produk olahan pangan lainnya.
4. Bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini yang menyebabkan terhambatnya produksi olahan dikarenakan banyaknya sarana dan prasarana pengolahan yang rusak.
5. Beberapa pengolah memiliki mata pencaharian yang lain diluar kegiatan pengolahan dan mereka memfokuskan pada kegiatan yang lebih menguntungkan ketika musim-musim tertentu.

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja di dasarkan pada kriteria berikut :

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

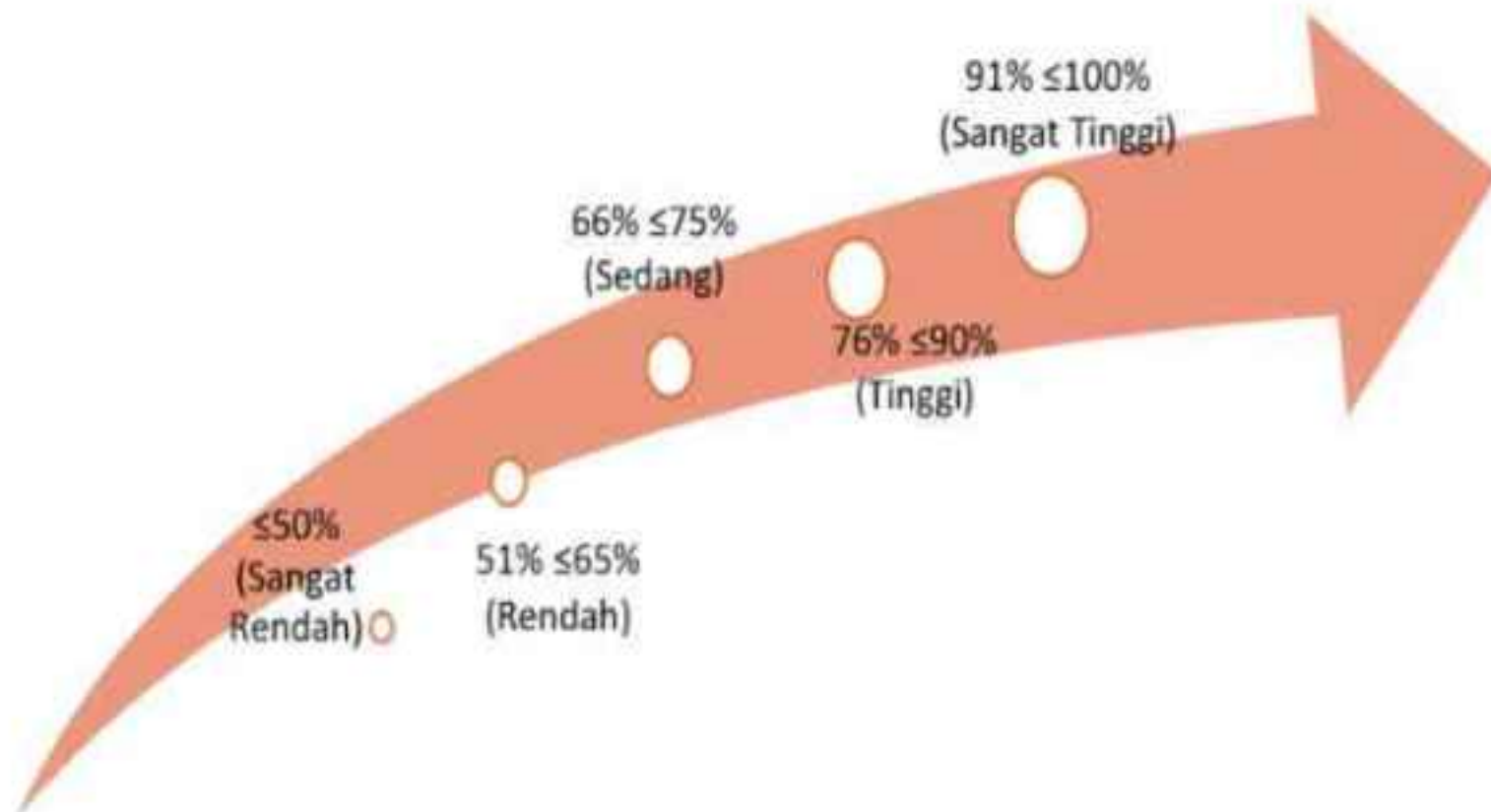
2. Jika realisasi tinggi yang menunjukan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan adalah gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di sektor kelautan, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran, serta pengawasan sumber daya kelautan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra/Renja/PK) dengan realisasi yang dicapai pada akhir periode, sehingga dapat diketahui efektivitas, efisiensi, dan dampak penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan.



Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,11	1,20	108,11
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51	0,51	100
3.	Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	160	80	50
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,05	2,15	104,88
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	64,71	59,74	92,32
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,54)	A (81,47)	101,15
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (84)	B (85)	101,19
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					93,95

Sumber : Diolah dari data primer, penetapan kinerja DKP 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari 7 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **93,95%** hal ini termasuk keberhasilan **Sangat Tinggi**. Dari 7 indikator kinerja, 4 indikator kinerja capaiannya di atas 100% (Sangat Tinggi), 1 indikator kinerja capaian 100% dan 2 indikator kinerja capaiannya di bawah 100%. Pencapaian Sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 7 indikator kinerja.



3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari capaian indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.	Tujuan 1	Meningkatnya Pendapatan
-----------	-----------------	--------------------------------

Tujuan Meningkatkan Pendapatan dengan indikator tujuan terdiri dari:

- a. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/thn)
- b. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/thn)

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Sedangkan pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata rata



per Kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi 2 indikator tujuan dapat dilihat dari uraian di bawah ini :

1. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 51.549.000,- org/thn
2. Jumlah Pendapatan Nelayan dengan target : Rp. 43.292.000,- org /thn

Hasil Pengukuran Kinerja Provinsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Jumlah Pendapatan Pembudidaya dan Nelayan 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian %	Kategori
1.	Jumlah pendapatan pembudidaya ikan Rp/org/thn	51.549.000	54.619.240	105,96	Sangat Tinggi
2.	Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/thn	43.292.000	43.966.796	101,56	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 target dari indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target sebesar Rp.51.549.000,-/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp.54.619.240,-/org/thn dengan tingkat capaian sebesar 105,96% termasuk kriteria Sangat Tinggi. Sedangkan jumlah pendapatan nelayan dari target Rp.43.292.000,-/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp.43.966.796,-/org/thn dengan tingkat capaian 101,56%, pendapatan nelayan ini juga mencapai target, dengan kriteria Sangat Tinggi.

Hal ini dapat kita lihat pada uraian di bawah ini :

a. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan

Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target Rp.51.549.000,-/org/thn terealisasi sebesar Rp.54.619.240,-/org/thn dengan capaian 105,96% dengan kriteria Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan per pembudidaya Tahun 2025 pada tabel 3.3 di bawah ini :



Tabel 3.3 Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2025

No	Jenis usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	Biaya prod (Rp.000)	Pendapatan (Rp.000)	Pendapatan /org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	203.611,486	5.049.564.852,80	67.077	3.787.173.639,60	1.262.391.213,20	18.820,03
2	Kolam Air Deras	34.220,134	909.913.363	4.477	682.435.022,25	227.478.340,75	50.810,44
3	Jaring Apung Tawar	14.476,749	381.505.766	1.861	286.129.324,50	95.376.441,50	51.250,10
4	Tambak	5.184,613	351.314.461	438	263.485.845,75	87.828.615,25	200.521,95
5	Keramba	4.633,880	147.227.635	470	110.420.726,25	36.806.908,75	78.312,57
6	Sawah	1.052,800	30.425.920	1.551	22.819.440,00	7.606.480,00	4.904,24
7	Budidaya laut	184,450	29.106.210	670	21.829.657,50	7.276.552,50	10.860,53
8	Jaring Tancap Tawar	789,69	24.480.390	285	18.360.292,50	6.120.097,50	21.474,03
	Jumlah	264.153,80	6.923.538.597,80	76.829	5.192.653.948	1.730.884.649	436.953,89
	Pendapatan per jenis usaha tahun 2025						54.619,24
	Pendapatan per org/bln tahun 2025						4.551,60

Sumber : One Data KKP,2025

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3-4 kali dalam setahun. Jumlah produksi yang didapat pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai jual perjenis ikan budidaya tersebut dikurangi dengan biaya produksi. Atau uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidaya ikan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi. Adapun pada tahun 2025, jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 264.153,80 ton dengan jumlah pembudidaya ikan 76.829 orang, sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 262.809 ton dan jumlah pembudidaya ikan 76.829 orang. Jumlah pembudidaya tahun 2025 bila dibandingkan dengan jumlah pembudidaya tahun 2024 adalah sama dan terjadi peningkatan produksi sebesar 0,51%.



Data pendapatan pembudidaya ikan tahun 2025 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

b. Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Nelayan

Indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 225.245,95 ton dan perairan umum sebesar 13.630,79 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 238.876,74 ton pada tahun 2025 dan jumlah nelayan tahun 2025 sebanyak 46.650 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya.

Data pendapatan nelayan tahun 2025 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.



Tabel 3.4 Pendapatan Nelayan Tahun 2025

TW	PRODUKSI (TON)	HARGA RATA-RATA PER KG	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	BIAYA PRODUKSI (Rp.000)	PENERIMAAN (Rp.000)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp.000)	Pendapatan Nelayan (Rp.000)	Jumlah Nelayan
I	56.132,57	28.850	1.599.778.245	479.933.474	1.119.844.772	615.914.624	503.930.147	46.650
II	58.839,59	29.100	1.712.232.069	513.669.621	1.198.562.448	659.209.347	539.353.102	46.650
III	64.525,81	29.000	1.871.248.490	561.374.547	1.309.873.943	785.924.366	523.949.577	46.650
IV	59.378,77	29.100	1.727.922.207	518.376.662	1.209.545.545	725.727.327	483.818.218	46.650
Jumlah	238.876,74			2.073.354.303	4.837.826.708	2.786.775.664	2.051.051.044	
Pendapatan Nelayan Pertahun (Rp.000)							2.051.051.044	
Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)							170.920.920	
Pendapatan Nelayan Perbulan/orang (Rp.000)							3.663.900	
Pendapatan Pemilik Kapal Pertahun (Rp.000)							2.786.775.664	
Pendapatan Pemilik Kapal Perbulan (Rp.000)							232.231.305	

Sumber : One Data KKP,2025

* Pendapatan Nelayan / org /tahun = 43.966.796

Rekapitulasi hasil Pengukuran Pendapatan Tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Pengukuran Pendapatan Tahun 2024 - 2025

No.	Indikator Kinerja	2024			2025 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	50.048.000	54.526.870	108,95	51.549.000	54.619.240	105,96
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	42.443.000	42.513.858	100,17	43.292.000	43.966.796	101,56

*Angka sementara Sumber : One Data KKP,2025

Realisasi pendapatan pembudidaya ikan tahun 2025 mengalami kenaikan 0,17% dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan realisasi pendapatan nelayan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,42 % dibandingkan dengan tahun 2024.

Berikut sajian persandingan antara jumlah pendapatan pembudidaya dan pendapatan nelayan Provinsi Sumatera Barat dengan angka nasional tahun 2025.



Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional *	% Capaian terhadap Nasional
1.	Jumlah Pendapatan pembudidaya (Rp/org/th)	54.619.240	-	-
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	43.966.796	53.032.596	82,91

*Angka sementara Sumber : One Data KKP,2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terkait pendapatan nelayan turut berkontribusi positif pada capaian nasional walaupun masih di bawah capaian nasional. Untuk pendapatan pembudidaya ikan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan nasional karena untuk tahun ini, tidak lagi menjadi IKU nasional sehingga tidak dilakukan pengukuran dan penghitungan.

Tujuan Meningkatnya Pendapatan dicapai dengan menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3.2. Tujuan I dan 4 Sasaran Strategis



Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pendapatan yang telah ditetapkan dengan 4 sasaran dan 4 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian empat sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
------------------	--

Meningkatnya produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat merupakan hasil dari sinergi antara potensi sumber daya kelautan yang besar dengan berbagai upaya pembangunan sektor perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki kekayaan sumber daya ikan pelagis dan demersal yang cukup melimpah, sehingga menjadi modal utama dalam pengembangan perikanan tangkap.

Peningkatan produksi tersebut juga didorong oleh peran aktif pemerintah daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, fasilitasi kebutuhan nelayan seperti bahan bakar minyak, serta bantuan alat tangkap yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada nelayan terus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta penerapan teknik penangkapan ikan yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya produktivitas usaha penangkapan ikan.

Dukungan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan, juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi. Infrastruktur yang memadai mempermudah nelayan dalam aktivitas bongkar muat hasil tangkapan, mempercepat distribusi, serta menjaga mutu ikan. Kondisi ini mendorong nelayan untuk lebih optimal dalam memanfaatkan waktu dan wilayah penangkapan.

Di samping itu, kebijakan pengelolaan perikanan yang lebih terarah dan berbasis keberlanjutan turut menjaga ketersediaan sumber daya ikan. Dengan pengaturan penangkapan yang lebih baik serta meningkatnya kesadaran nelayan terhadap kelestarian sumber daya laut, kegiatan perikanan tangkap dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa merusak ekosistem.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta



pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Secara keseluruhan, meningkatnya produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,11	1,20	108,11	<p>a. Target 1,11 %</p> <p>b. Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 sebesar 238.876,74 ton sehingga persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar :</p> <p>Realisasi Thn 2025 - Realisasi Thn 2024 ----- X 100% Realisasi Tahun 2024</p> <p>= 238.876,74 ton - 236.044,75 ton ----- x 100% 236.044,75 ton</p> <p>= 2.831,99 ----- x 100% = 1,20 % 236.044,75</p> <p>c. Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$ </div> <p>= $\frac{1,20}{1,09} \times 100 = 108,11 \%$</p>

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan besarnya produksi perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu dikali 100%.

Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing - masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024 dan 2025

No.	Kab/Kota	2024			2025		
		Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total
1	Kab. Agam	8.885,65	865,66	9.751,31	9.201,06	600,00	9.801,06
2	Kab. Kep. Mentawai	12.327,86	0,00	12.327,32	12.589,09	0,00	12.589,09
3	Kota Padang	28.830,64	19,09	28.849,73	32.500,41	19,95	32.520,36
4	Kota Pariaman	6.087,51	0,00	6.087,51	6.025,36	0,00	6.025,36
5	Kab. Padang Pariaman	18.954,10	727,00	19.681,10	19.491,71	791,00	20.282,71
6	Kab. Pasaman Barat	100.675,10	0,00	100.675,10	96.631,86	0,00	96.631,86
7	Kab. Pesisir Selatan	47.968,10	105,62	48.073,71	48.806,46	97,72	48.904,18
8	Kab. Dharmasraya	-	350,48	350,48	-	1.847,50	1.847,50
9	Kota Bukittinggi	-	1,78	1,78	-	2,50	2,50
10	Kota Padang Panjang	-	3,16	3,16	-	2,42	2,42
11	Kota Payakumbuh	-	11,45	11,45	-	11,85	11,85
12	Kota Sawahlunto	-	28,35	28,35	-	29,70	29,70
13	Kota Solok	-	4,40	4,40	-	4,40	4,40
14	Kab. Lima Puluh Kota	-	4.141,74	4.141,74	-	4.304,73	4.304,73
15	Kab. Pasaman	-	1.176,49	1.176,49	-	1.153,19	1.153,19
16	Kab. Sijunjung	-	190,48	190,48	-	221,33	221,33
17	Kab. Solok	-	1.044,83	1.044,83	-	1.068,43	1.068,43
18	Kab. Solok Selatan	-	714,17	714,17	-	556,37	556,37
19	Kab. Tanah Datar	-	2.931,12	2.931,12	-	2.919,70	2.919,70
	TOTAL	223.728,96	12.315,79	236.044,75	225.245,95	13.630,79	238.876,74

Sumber : DKP, 2025

Produksi perikanan tangkap tahun 2025 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu tongkol, teri, tuna, kerapu dan lain-lain. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-572 yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP-572) dengan potensi sebesar 1.229.950 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni $\pm 94,44\%$ atau sebesar 1.161.564,78 ton.

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim. Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan



Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan, pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan ke setiap Kab/Kota mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.

Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, rumpon laut dangkal dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

Dalam 2 tahun terakhir jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2024 dan 2025

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jaring	175 unit	52 unit
2.	Mesin	225 unit	142 unit
3.	Fish Box	650 unit	201 unit
4.	Perahu Fiber	10 unit	1 unit
5.	Sarana Penangkapan Ikan di Danau Maninjau	0 unit	3 unit
Total		1.060 unit	399 unit

Tabel 3.10. Rekapitulasi Bantuan Perikanan Tangkap Tahun 2025

No	Jenis Bantuan	KABUPATEN/KOTA								Total
		Kab. Agam	Kab. Pasaman Barat	Kab. Padang Pariaman	Kab. Pesisir Selatan	Kota Pariaman	Kota Padang	Kab. Solok	Kab. Kep. Mentawai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mesin Tempel 40 PK	6	-	3	12	4	-	-	-	25
2	Mesin Tempel 20 PK	1	-	-	1	-	5	-	5	12
3	Mesin Tempel 15 PK	16	-	6	36	4	5	-	8	75
4	Mesin Tempel 8 PK	-	-	-	6	-	-	-	-	6
5	Mesin Tempel 3,5 PK	-	-	-	-	-	-	2	-	2



No	Jenis Bantuan	KABUPATEN/KOTA								Total
		Kab. Agam	Kab. Pasaman Barat	Kab. Padang Pariaman	Kab. Pesisir Selatan	Kota Pariaman	Kota Padang	Kab. Solok	Kab. Kep. Mentawai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Mesin Long Tail 13 PK	-	-	7	-	11	-	-	-	18
7	Mesin Long Tail 9 PK	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	Mesin Diesel	3	-	-	-	-	-	-	-	3
9	Jaring Hijau 2½ inchi	10	-	-	-	-	-	-	-	10
10	Jaring Hijau 2¼ inchi	-	-	-	11	-	-	-	-	11
11	Perahu fiber	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12	Gillnet monofilament	-	3	-	-	-	13	-	-	16
13	Gillnet Maninjau	15	-	-	-	-	-	-	-	15
14	Sarana penangkapan di Danau Maninjau	3	-	-	-	-	-	-	-	3
15	Fishbox 100 Liter	20	-	-	179	-	-	-	-	199
16	Fishbox 550 Liter	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		76	3	18	245	19	23	2	13	399

Dari tabel dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan ke nelayan memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin, jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan kuat, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan.











Peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan adalah:

1. Penambahan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu.
2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

Disamping pemberian bantuan berupa sarana penangkapan ikan, untuk menjaga produksi hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan upaya peningkatan fungsi pemerintahan dan perusahaan operasional di UPTD pelabuhan perikanan yaitu (Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Tarusan Kab. Pesisir Selatan, Pelabuhan Perikanan Wilayah II Air Bangis Kab. Pasaman Barat dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III di Sikakap Kab. Kep. Mentawai) seperti dermaga, pembangunan kantor Surantih, Kios PPI Air Bangis, Gudang ikan Air Bangis, becak motor, dan lain-lain untuk kebutuhan operasional penangkapan. Untuk tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan di ketiga UPTD pelabuhan ini adalah memberikan pelayanan dan membantu terhadap kebutuhan pengurusan administrasi nelayan sekitar. Disamping itu juga dilakukan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 1 ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023- 2025

No.	Indikator Kinerja	2023			2024			2025 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,07	5,83	544,86	1,09	1,99	182,57	1,11	1,20	108,11

*Angka sementara

Jika dilihat dari indikator kinerja, persentase peningkatan produksi perikanan tangkap meningkat di tahun 2023 dan terus mengalami penurunan di tahun 2024 dan tahun 2025 dari 5,83%, menurun menjadi 1,99% dan turun kembali



menjadi 1,20%. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.3 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 - 2025

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 *	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2025 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,20	1,17	102,56%

*Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2025 sebesar 1,20% dengan capaian sebesar 102,56% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 1,17%. Dilihat dari capaian tahun ini, sebenarnya telah melebihi target akhir Renstra, sehingga perlu perbaikan target Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Tinggi dan Sangat Tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja masih memakai meningkatnya pendapatan nelayan.



Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.4 Perkembangan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Bantuan yang diserahkan Tahun 2022 - 2025

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2022 ke tahun 2023 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap cenderung mengalami kenaikan. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah bantuan yang juga mengalami kenaikan. Ditambah dengan adanya fenomena alam pada akhir tahun 2023 dimana terjadi kelimpahan hasil perikanan laut, sampai beberapa daerah harus membuang hasil tangkapan kembali ke laut (Kabupaten Pesisir Selatan) karena harga jual menjadi sangat rendah. Tetapi pada tahun 2024 dan 2025 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini terutama dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem dan perubahan iklim, terjadinya banjir bandang dalam 2 tahun terakhir ini sangat mempengaruhi terhadap hasil tangkapan di laut terutama sedimentasi di muara yang menyulitkan kapal keluar masuk laut, pencemaran laut dan kerusakan habitat, serta keterbatasan alat tangkap dan kondisi teknis nelayan yang tidak mampu bertahan dalam kondisi laut yang berubah. Faktor-faktor ini bersama-sama mengurangi frekuensi melaut dan volume tangkapan ikan, termasuk jumlah pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang juga jauh menurun jumlahnya dibandingkan 3 tahun sebelumnya dikarenakan efisiensi anggaran.



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025*	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,20	0,49	+

*Angka sementara

Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nasional

Capaian	Produksi (ton)	
	2024	2025*
Nasional (ton)	7.811.614	7.850.200
Peningkatan (%)	-0,43	0,49
Sumatera Barat (ton)	236.044,21	238.876,74
Peningkatan (%)	1,99	1,20

*Angka sementara Sumber : One Data KKP,2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2025 meningkat sebesar 0,49% dari tahun sebelumnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 1,20% dengan tingkat capaian 108,11%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai *upaya* yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan sarana penangkapan ikan dengan memberikan bantuan mesin tempel, alat penangkapan ikan serta sarana penyimpanan ikan berupa fish box yang berasal dari Kementerian, Provinsi dan Kab/Kota.
2. Memberikan pelayanan perizinan kepada kapal-kapal perikanan berupa rekomendasi sehingga usaha penangkapan ikan dapat berjalan dengan lancar.
3. Memberikan sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan
4. Melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha nelayan berupa SeHAT, BPJS



5. Penyediaan sarana yang dibutuhkan nelayan di Pelabuhan Perikanan seperti tambat labuh, air bersih, es dan SPBUN

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah :

1. Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.
2. Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya.
4. Proses perizinan yang masih tidak lancar dan terkesan rumit sehingga banyak nelayan terkena razia di laut.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

1. Tetap melaksanakan apa yang sudah di upayakan pada tahun sebelumnya seperti pemberian bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (SDI), dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Melaksanakan koordinasi antar Instansi terkait perizinan usaha perikanan (PPS Bungus, KSOP, Lantamal, PPW I, PPW II, PPW III , DPMPTSP).
4. Melaksanakan PKS dengan universitas dalam rangka peningkatan produksi dan upaya mengatasi permasalahan nelayan.
5. Melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha nelayan.
6. Mengupayakan proses perizinan yang lebih efektif bagi pelaku usaha perikanan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.



Tabel 3.15. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(7.151.355.724 \times 108,11\%) - 6.852.263.585}{7.151.355.724} \times 100\% \\ &= 0,12 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi lebih dari 20% maka nilai efisiensi adalah 100%.



Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi 0,12 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, diperoleh *nilai efisiensi 80,73%* dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp. 7.151.355.724,- dan terealisasi Rp. 6.852.263.585,- (95,82%).

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3	7.151.355.724	6.852.263.585
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3	7.151.355.724	6.852.263.585

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.151.355.724	6.852.263.585	95,82	99,82	299.092.139
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.484.620.250	5.253.919.837	95,79	100	230.700.413
1.1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.484.620.250	5.253.919.837	95,79	100	230.700.413
2	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	378.001.500	362.654.050	95,94	100	15.347.450
2.1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	378.001.500	362.654.050	95,94	100	15.347.450
3	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.288.733.974	1.235.689.698	95,88	99	53.044.276
3.1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW I]	258.613.138	252.238.550	97,54	100	6.374.588



3.2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW II]	921.432.750	905.157.848	98,23	100	16.274.902
3.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD PPW III]	95.812.000	78.293.300	81,72	100	17.518.700
3.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW I]	12.876.086	0	0	0	12.876.086

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 7.151.355.724,- terealisasi sebesar Rp 6.852.263.585,- atau 95,82%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 299.092.139,- (4,18%) yang berasal dari sisa-sisa kontrak kegiatan. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap (108,11%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,82%) dengan tingkat efisiensi 0,12.

Anggaran sebesar Rp. 7.151.355.724,- berada pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 3 Kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 5 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Ada 1 sub kegiatan yang tidak terlaksana karena merupakan sisa DAK tahun 2023 Jasa Konsultansi Perencanaan Pabrik Es yang fisiknya tidak terlaksana sehingga tidak dapat dicairkan. Pencapaian sub kegiatan lain yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap*.

Sasaran 2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
------------------	---

Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kabupaten/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu ada potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.

Potensi produksi perikanan budidaya di Sumatera Barat menurut jenis usaha tahun 2025 yaitu kolam air tenang 203.611,486 ton, kolam air deras 34,220.134 ton, jaring apung tawar 14,476.749 ton, Tambak 5,184.613 ton, Keramba 4,633.880 ton, sawah 1,052.800 ton, Budidaya laut 184,450 ton dan jaring tancap tawar dengan produksi 789,69 ton.



Komoditi utama untuk budidaya air tawar adalah ikan mas, nila, gurami dan lele. Pada Tahun 2025 produksi perikanan budidaya sebesar 264.153,80 Ton dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 76.829 orang. Pada saat ini juga mulai berkembang budidaya air payau di tambak yaitu budidaya udang vaname di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi perikanan budidaya air tawar ini tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota yaitu antara lain : Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar.

Bentuk kegiatan perikanan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah budidaya pada kolam air tenang, kolam air deras, keramba jaring apung dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah Minapadi. Meningkatnya produksi perikanan budidaya merupakan indikator positif dari berkembangnya sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Peningkatan ini umumnya didorong oleh semakin baiknya penerapan teknologi budidaya, seperti penggunaan benih unggul, pakan berkualitas, serta sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan teknologi yang tepat, produktivitas kolam, tambak, keramba, maupun bioflok dapat meningkat tanpa harus memperluas lahan secara signifikan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023, telah ditetapkan 6 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kampung Perikanan Budidaya yaitu :

1. Kabupaten Pasaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan mas
2. Kabupaten Agam sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan nila
3. Kota Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan lele
4. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
5. Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
6. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami

Provinsi Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan budidaya Rumput Laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

- a. Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- c. Kabupaten Pasaman Barat



Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.

Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah berpedoman kepada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan setelah melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend capaian kinerja dan anggaran selama tahun 2025.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51	0,51	100	<p>Target 0,51%</p> <p>Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 sebesar 264.153,80 ton sehingga persentase peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar</p> $\frac{\text{Realisasi Thn 2025} - \text{Realisasi Thn 2024}}{\text{Realisasi Tahun 2024}} \times 100\%$ $= \frac{264.153,80 \text{ ton} - 262.809 \text{ ton}}{262.809 \text{ ton}} \times 100\%$ $= \frac{1.344,80}{262.809} \times 100\% = 0,51\%$



					<p>Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$ </div> <p>= $\frac{0,51}{0,51} \times 100 = 100 \%$</p>
--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 target dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target sebesar 0,51% dan terealisasi sebesar 0,51% dengan tingkat capaian sebesar 100% termasuk kategori Sangat Tinggi.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu (sebelumnya) dikali 100%.

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 sebesar 264.153,80 ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 262.809 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing-masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 dan 2025

No	Kab/Kota	Produksi (Ton)	
		2024	2025
1	Lima Puluh Kota	38.503,32	39.389,91
2	Agam	33.409,39	33.699,91
3	Pesisir Selatan	14.757,46	15.919,82
4	Dharmasraya	27.105,49	23.757,62
5	Sijunjung	2.163,33	2.164,189
6	Tanah Datar	6.654,99	6.640,16
7	Pasaman	62.718,75	63.902,01
8	Pasaman Barat	5.905,49	5.708,63
9	Padang Pariaman	57.914,62	5.9374,14
10	Kab. Solok	5.316,08	5.199,31
11	Solok Selatan	3.015,55	2952,53
12	Mentawai	331,11	314,08
13	Padang	2.664,10	2.881,712
14	Pariaman	324,30	318,35



15	Ko.Solok	158,65	159,2
16	Payakumbuh	565,43	560,35
17	Sawahlunto	201,35	201,78
18	Padang Panjang	751,03	752
19	Bukittinggi	348,40	258,1
Total		262.809	264.153,80

Sumber : DKP, 2025

Dari hasil produksi perikanan budidaya Tahun 2025 dapat diperoleh persentase peningkatan produksi budidaya sebesar 0,51% dengan rumus produksi tahun 2025 dikurang produksi tahun sebelumnya (2024) dibagi dengan produksi 2024 dikalikan 100 yaitu $264.153,80 \text{ ton} - 262.809 \text{ ton} = 1.344,80 / 262.809 \times 100 = 0,51\%$. Produksi perikanan budidaya tahun 2025 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu mas, nila, lele, gurami dan lain-lain

Angka capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan budidaya masih bersifat sementara dimana untuk data produksi perikanan budidaya secara umum dari Kabupaten/Kota masih menggunakan capaian yang diproyeksikan yang nantinya semua data tersebut akan divalidasikan secara nasional baik di Provinsi maupun di Pusat.

Peluang untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan adalah :

1. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar (kolam air deras dan kolam mina padi) dan budidaya secara intensif.
2. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan.

Produksi perikanan budidaya tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim, banjir dan serangan hama dan penyakit ikan. Beberapa hal tersebut diatas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut salah satu upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya, antara lain pemberian bantuan benih, pakan, induk ikan unggul dan sarana perikanan budidaya.











Tabel 3.19 Bantuan perikanan budidaya yang diberikan pada tahun 2025 :

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN/KOTA											TOTAL
		PESISIR SELATAN	PADANG	PASAMAN	PARIAMAN	PDG PARIAMAN	SO KOTA	KOTA SOLOK	KAB. SOLOK	SIUNJUNG	DHARMASRAYA	BUKIT TINGGI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Berih Ikan Nila		25.000				130.000	30.000					385.000
2	Pakan Berih Ikan Nila (Kg)		4.000				55.830	4.860					64.750
3	Berih Ikan Mas (ekor)			20.000			135.000						155.000
4	Pakan Ikan Mas (Kg)			3.900			22.380						26.280
5	Berih Lefe	60.000					150.000					13.770	243.770
6	Pakan Lefe (Kg)	8.880					21.180					5.820	35.880
7	Berih Gurami	31.280				16.300	133.800						181.380
8	Pakan Gurami	2.790				1.340	35.264						39.394
9	Calon induk ikan Nila								436				436
10	Pakan Induk Ikan Nila (Kg)								100				100
11	Induk ikan Lefe				100					150	100		350
12	Pakan induk ikan Lefe (Kg)				200					300	200		700
13	Induk ikan mas (Kg)			150					100				250
14	Pakan induk ikan mas (Kg)			300					200				500
15	Benur vaname	595.400											595.400
16	Pakan vaname	6.300											6.300
17	Kolam terpal bundar							20				13	33
18	Mesin Pakan										4		4
TOTAL		704.650	29.000	24.350	300	17.640	881.514	34.880	836	450	304	39.603	1.735.527



Dari tabel di atas, dapat kita rekapitulasi jumlah bantuan sarana peningkatan yang diberikan adalah tabel 3.20 sebagai berikut :

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Benih ikan nila	236.056 ekor	385.000 ekor
2.	Benih ikan mas	100.000 ekor	155.000 ekor
3.	Benih ikan lele	333.975 ekor	243.770 ekor
4.	Benih ikan gurami	20.000 ekor	181.380 ekor
5.	Pakan benih	46.785 Kg	166.304 Kg
6.	Calon induk nila	800 Kg	436 Kg
7.	Induk lele	500 Kg	350 Kg
8.	Induk mas	0	250 Kg
9.	Pakan induk	3.820 Kg	1.300 Kg
10.	Benih kerapu hybrid	4.500 ekor	0
11.	Pakan Kerapu	1.500 Kg	0
12.	Benur vaname	440.000 ekor	595.400 ekor
13.	Pakan vaname	6.000 Kg	6.300 Kg
14.	Kepiting	200 ekor	0
15.	Apartemen kepiting	2 unit	0
16.	Benih lobster	1.400 ekor	0
17.	KJA lobster	2 unit	2 unit
18.	Apartemen cacing sutra	1 unit	1 unit
19.	Kolam terpal bundar	0	33 unit
20.	Mesin pakan	0	4 unit

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 - 2025

No.	Indikator Kinerja	2023			2024			2025 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,39	2,052	60,53	3,71	1,84	49,60	0,51	0,51	100

*angka sementara



Jika dilihat dari indikator kinerja, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang sebelumnya 2,052% menurun menjadi 1,84% dan menurun kembali di tahun 2025 menjadi 0,51%. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.5 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 - 2025

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025 *	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51	3,97	12,85%

*Angka sementara

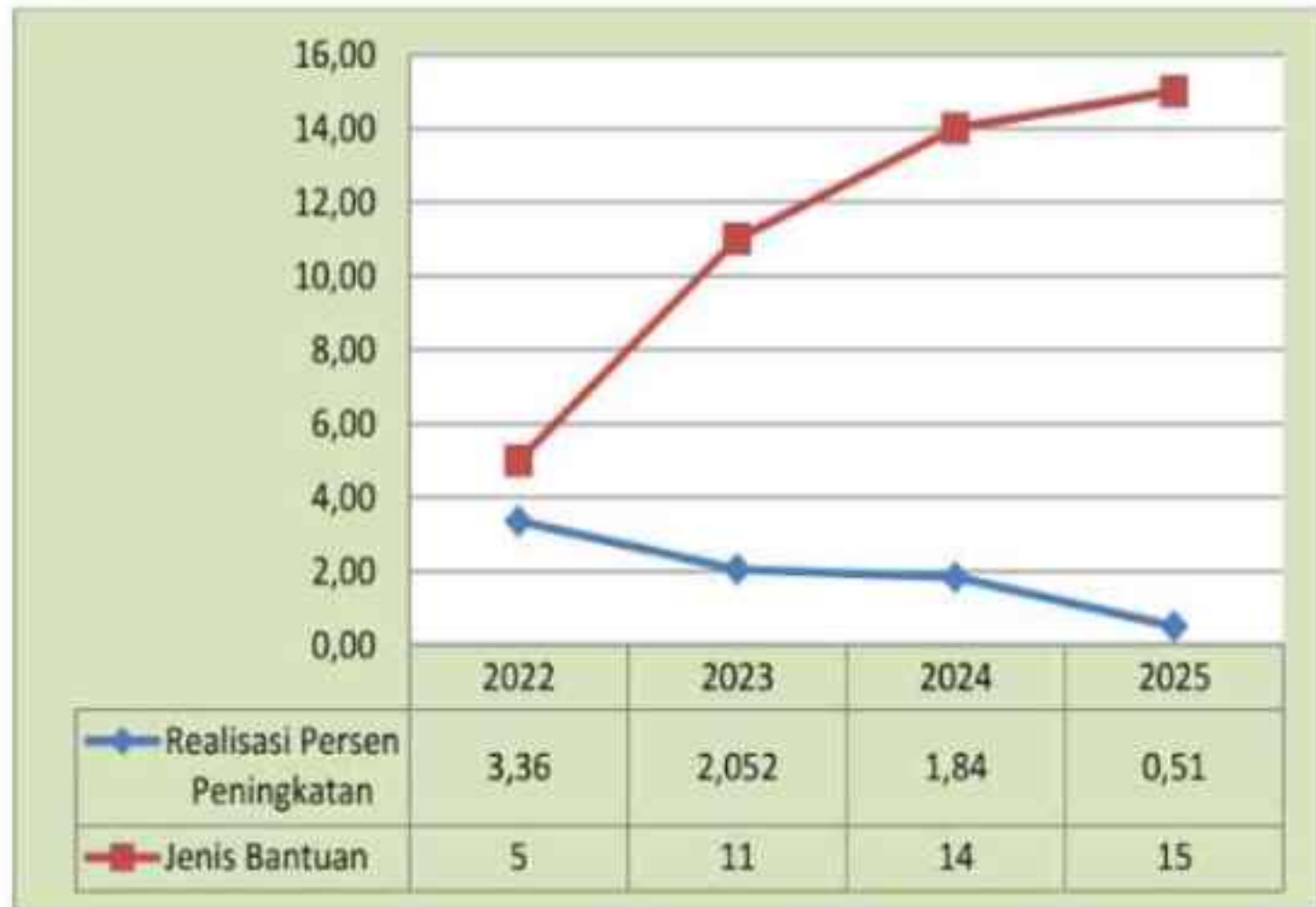
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2025 sebesar 0,51% dengan capaian sebesar 12,85% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 3,97%. Dilihat dari capaian tahun ini, sebenarnya perlu usaha dan kerja keras bersama agar target akhir Renstra tercapai.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif, mulai dari interval Sangat rendah sampai Sangat Tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase



peningkatan produksi perikanan budidaya baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja masih memakai meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya untuk lima tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyak faktor, salah satunya yaitu pasokan bibit ikan unggul dan pakan berkualitas masih kurang, harga pakan yang tinggi, sementara kebutuhan semakin tinggi sehingga produktivitas budidaya berkurang. Selain itu, berkurangnya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak +/- 20-30% di Danau Maninjau juga mengakibatkan penurunan +/- 15 ribu ton hasil produksi budidaya ikan di Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat mengalami musibah galodo dan banjir bandang yang terjadi Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang hal ini juga mempengaruhi terhadap jumlah produksi perikanan budidaya. Belum sepenuhnya pulih terhadap bencana tahun 2024, di bulan November 2025 kembali terjadi bencana hidrometeorologi yang menyebabkan banyak pembudidaya kita di 13 Kabupaten Kota terdampak, kolam-kolam masyarakat banyak tertimbun, dan ikan yang sudah hampir panen pun terbawa hanyut, beserta indukan dan benih. Kejadian dalam 3 tahun berturut-turut ini sangat mempengaruhi jumlah produksi perikanan budidaya perikanan di Sumatera Barat



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025*	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51	1,26	+

*Angka sementara

Capaian peningkatan produksi perikanan budidaya Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24 Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Nasional

Capaian	Produksi (ton)	
	2024	2025
Nasional (ton)	17.182.010	18.411.941
Peningkatan (%)	1,26	7,16
Sumatera Barat (ton)	262.809	264.153,80
Peningkatan (%)	1,84	0,51

*Angka sementara Sumber : One Data KKP,2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2025 meningkat sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Memberikan bantuan benih dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan.
2. Memberikan bantuan induk ikan unggul dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan.
3. Memberikan bantuan sarana pembudidaya ikan.
4. Meningkatkan akses pembudidaya ikan terhadap sarana dan produksi, teknologi serta pasar.
5. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan.



Hambatan yang masih ditemui dalam upaya persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah:

1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.
2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
3. Ketersediaan induk unggul terbatas.
4. Kualitas SDM pembudidaya.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

1. Menekan Biaya pakan dengan upaya melakukan Pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik sehingga Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) yang bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan membangun Pabrik Pakan di Sumatera Barat agar biaya produksi lebih kecil.
2. Meningkatkan koordinasi dengan balai benih ikan nasional untuk penyediaan induk unggul.
3. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini adalah Bidang Perikanan Budidaya dengan Dinas Perikanan yang membidangi perikanan di Kab/Kota, yang memiliki kewenangan terhadap kelompok pembudidaya serta langkah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya beserta kendala yang dihadapi.
4. Pembinaan teknis atau temu lapang dengan para pembudidaya untuk meningkatkan produksi dengan hasil yang optimal serta sehat dan aman untuk dikonsumsi.
5. Memberikan Bantuan Benih dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan.
6. Meningkatkan akses pembudidaya ikan terhadap sarana dan produksi, teknologi serta pasar.
7. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan.
8. Meningkatkan kompetensi Petugas Pembina budidaya dan pembudidaya ikan di Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis.



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.25. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Mendorong investor untuk berinvestasi pada kapal motor dengan ukuran skala besar sehingga nelayan dapat menjangkau wilayah laut lepas	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran



$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(5.707.290.858 \times 100\%) - 5.011.620.498}{5.011.620.498} \times 100\% \\ &= 0,10. \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi 0,10 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, diperoleh *nilai efisiensi 75,13%* dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan budidaya adalah sebesar Rp. 5.707.290.858,- dan terealisasi Rp. 5.011.620.498,- (87,81%).

Tabel 3.26 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	2	5.707.290.858	5.011.620.498
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2	5.707.290.858	5.011.620.498

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Persentase Peningkatan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.707.290.858	5.011.620.498	87,81	85,69	695.670.360
1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	466.949.618	443.656.228	95,01	100	23.293.390



1.1	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD BPBALP]	89.425.800	75.925.528	84,9	100	13.500.272
1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	377.523.818	367.730.700	97,41	100	9.793.118
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	5.240.341.240	4.567.964.270	87,17	84,41	672.376.970
2.1	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.159.919.240	4.491.735.270	87,05	84,17	668.183.970
2.2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Air Payau Dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi Dan/Atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD KPSDKP]	80.422.000	76.229.000	94,79	100	4.193.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp **5.707.290.858,-** terealisasi sebesar Rp **5.011.620.498,-** atau 87,81%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 695.670.360,- (12,19%) yang berasal dari sisa-sisa kontrak kegiatan dan ada kegiatan yang tidak terlaksana. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87,81%) dengan tingkat efisiensi 0,10.

Anggaran sebesar Rp. 5.707.290.858,- berada pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 3 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Ada 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tidak tercapai outputnya dikarenakan ada kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu :

- a. Pengadaan Induk Ikan Mas *APBD (Rp.14.700.000,-)* dengan alasan tidak adanya ketersediaan Induk Ikan Mas di BPBAT Sungai Gelam, BBPBAT Sukabumi, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Subang.
- b. Pengadaan Benih Bening Lobster *APBD-P (Rp.79.980.000,-)* dikarenakan ketersediaan benih lobster tidak ada karena cuaca ekstrim dan tergantung pada alam dan sudah dilakukan koordinasi dengan kelompok penangkap benih bening lobster dan sudah diupayakan ketersediaan tetapi tetap tidak tersedia.



Pencapaian sub kegiatan lain yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya*.

Sasaran 3	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan
------------------	--

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

Pemasaran produk perikanan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan menyalurkan hasil perikanan dari produsen hingga ke konsumen secara efektif dan berkelanjutan. Pemasaran yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan nilai jual produk perikanan, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

Produk perikanan dapat dipasarkan dalam bentuk segar, beku, maupun olahan. Keberhasilan pemasaran sangat dipengaruhi oleh kualitas produk, kesegaran, keamanan pangan, serta kemasan yang menarik dan higienis. Penerapan standar mutu dan sertifikasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya dalam menembus pasar modern dan ekspor.

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Meningkatnya pemasaran produk perikanan mencerminkan semakin baiknya kemampuan pelaku usaha perikanan dalam menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kondisi ini didorong oleh perbaikan sistem distribusi, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk olahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemasaran.

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi pemasaran produk perikanan. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan



marketplace memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk secara lebih luas, cepat, dan efisien. Selain itu, kemitraan dengan pedagang besar, restoran, hotel, dan sektor pariwisata juga memperkuat jaringan pemasaran.

Dengan sistem pemasaran produk perikanan yang baik, rantai distribusi menjadi lebih efisien, risiko kerugian dapat ditekan, dan nilai tambah produk meningkat. Pada akhirnya, pemasaran produk perikanan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

Keberhasilan sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target 160 Milyar.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.27 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	160	80	50	Sangat Rendah

*angka sementara Sumber : DKP,2025

Data hasil ekspor perikanan yang resmi diperoleh dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang dan Pengumpul yang ada di 7 Kabupaten/Kota Pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat. Data dari pengumpul berasal dari Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk pengumpul yang ada di



Kabupaten Kepulauan Mentawai, mereka langsung menjual ke pengumpul di Kota Padang.

Sumatera Barat memiliki potensi ekspor perikanan yang cukup besar, namun nilai eksportnya relatif lebih kecil dibanding provinsi lain karena banyak hasil perikanan lokal yang dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan di luar Sumatera Barat (misal Jakarta) sehingga pencatatannya bukan atas nama Sumatera Barat. Nilai ekspor perikanan Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini masih tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan teknis yang saling berkaitan. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, nilai ekspor perikanan Sumatera Barat belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan industri hilir perikanan, peningkatan infrastruktur dan logistik, pengembangan SDM pelaku usaha, serta fasilitasi ekspor langsung dari daerah agar nilai ekspor perikanan Sumatera Barat dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang.

DATA EKSPORT HASIL PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO	JENIS	JUMLAH			Tujuan	KETERANGAN
		Kg	EKOR	RUPIAH		
I. Karantina						
1	Fresh Tuna	5		775.000	Jepang	
2	Tuna Frozen	258.623		40.086.603.750	Jepang	
3	Ikan Hias Laut	129.108		12.103.875.000	Cina	
4	Ikan sepat Kering, ikan teri kering, ikan kering acah, belut kering, udang rebon kering	28		4.051.320	Jepang	
5	Ikan Garing Beku	688		206.400.000	Malaysia	
6	Benih Garing (Mahseer Fry Live)	113.680		213.150.000	Malaysia	
7	Cangkang Kerang Turbin		7	1.260.000	Malaysia dan Thailand	
8	Ikan Betutu	1.693		389.275.000	Malaysia	
9	Ikan Cupang		41	4.100.000	Singapura	
10	Udang kelong beku	132		15.840.000	Malaysia	
TOTAL		503.956	48	53.025.330.070		
II. PT. Sumbar Laut AWI (Padang - Via Jakarta)						
1	Tuna (Sumbar laut)	-		-		Bulan Januari, Februari dan Maret tidak ada melakukan ekspor ikan dikarenakan rendahnya hasil



2	Gurita(S.Laut)	8.000		720.000.000		tangkapan yang dipengaruhi oleh musim ikan dan cuaca serta rendahnya kualitas ikan sehingga hanya di jual di pasar lokal
TOTAL		8.000	-	720.000.000		
III. (UD Maladewa) Pariaman						
1	Kerapu	12.000		1.200.000.000	Via Dumai dan Sibolga	
2	Kakap	12.000		1.080.000.000		
3	Udang kelong	12.000		1.440.000.000		
TOTAL		36.000	-	3.720.000.000		
IV. Lewat Darat (Pessel) (Medan dan Pekanbaru)						
1	Pari Air	5.155		128.875.000	Via Dumai dan Sibolga	
2	Pari Pasir	4.370		153.650.000		
3	Pari Lalek	7.710		154.200.000		
4	Tenggiri	12.900		866.250.000		
5	Tenggiri Padi	21.500		1.290.000.000		
6	Janaha	3.375		270.000.000		
7	G. Sawai	3.000		125.800.000		
8	G. Tiger	2.340		154.200.000		
9	Udang Kelong	9.260		1.206.600.000		
10	Udang Kipas (Hepo)	6.390		905.050.000		
11	Ranjung Merah	2.815		239.275.000		
12	Ranjung Biru	650		52.000.000		
13	Kakap	5.530		453.050.000		
TOTAL		84.995	-	5.998.950.000		
V. Lewat Darat (Agam) Jalur Medan						
1	Tenggiri	22.200		1.443.000.000	Via Dumai	Bulan Januari dan Februari tidak ada melakukan ekspor ikan dikarenakan rendahnya hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh musim ikan dan cuaca serta rendahnya kualitas ikan sehingga hanya di jual di pasar lokal
2	Kerapu	20.550		2.055.000.000		
3	Kakap Merah	17.600		1.232.000.000		
4	Kakap Hitam	14.700		1.029.000.000		
5	Baby tuna	65.000		3.575.000.000		
TOTAL		140.050	-	9.334.000.000		
VI. Lewat Darat (SASAK) Sibolga dan Dumai						
1	Tenggiri	40.807		2.652.455.000	Via Dumai dan Sibolga	
2	Bawal	23.381		1.169.050.000		
TOTAL		64.188	-	3.821.505.000		
VII. Lewat Darat (Air Bangis) Dumai						
1	Tenggiri	40.806		2.742.531.400	Via Dumai	
2	Bawal	6.612		359.097.000		
TOTAL		47.418	-	3.101.628.400		
JUMLAH		1.167.863	48	80.006.413.470		



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 3 ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025*		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	156,85	291	185,53	158,42	159,66	100,78	160	80	50

*angka sementara Sumber : DKP,2025

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami penurunan. Target indikator kinerja sasaran 3 ini tidak tercapai dan termasuk kategori Sangat Rendah.



Grafik 3.7 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Nilai eksport hasil perikanan Tahun 2023 - 2025

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.29 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

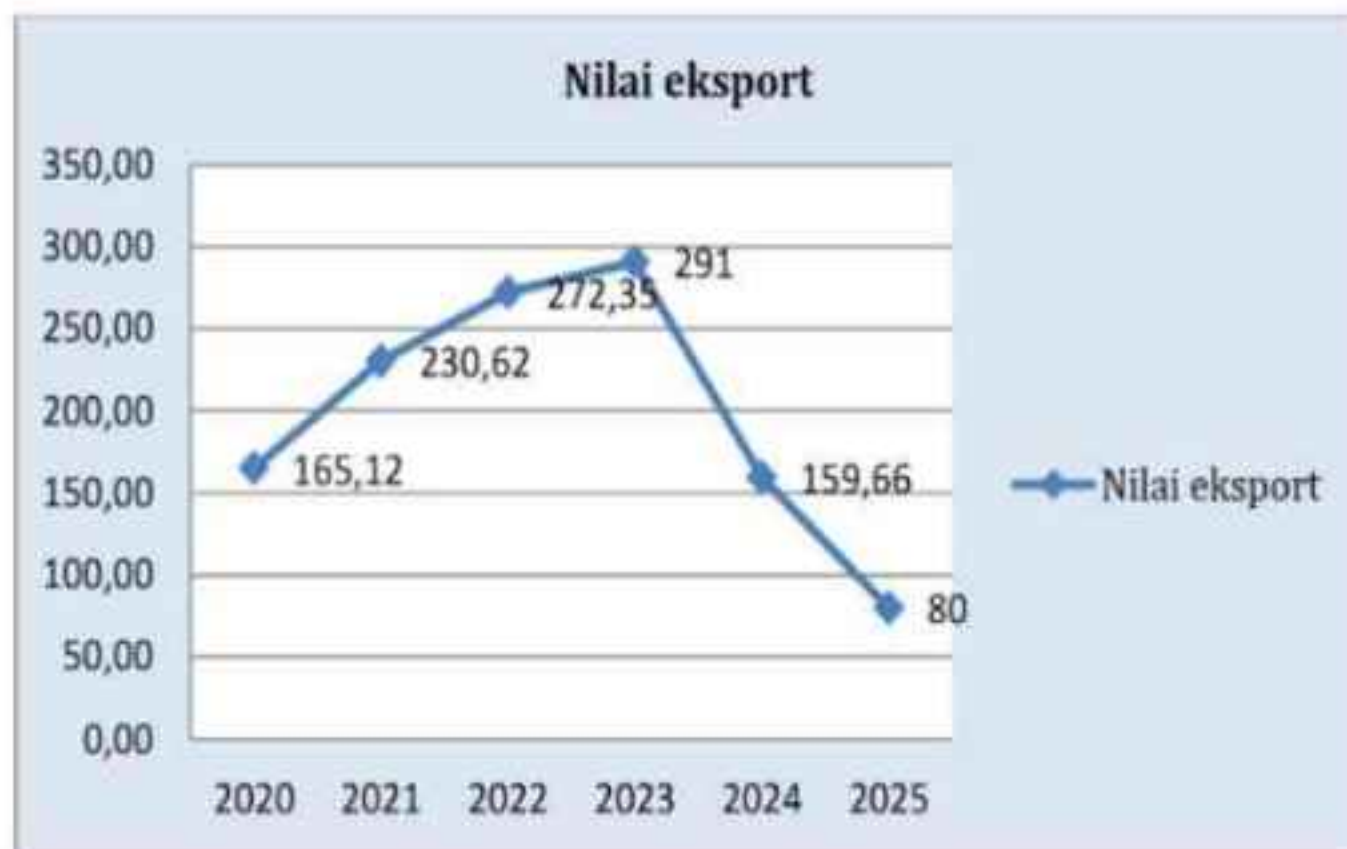
No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	80	161,60	49,50



Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) pada tahun 2025 sebesar 80 milyar telah mencapai 49,50% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 161,60 milyar. Capaian ini Sangat Rendah. Nilai ekspor hasil perikanan diambil dari jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin maupun olahan. Jenis komoditi yang dominan untuk di ekspor yaitu tuna, frozen tuna, lobster, layur segar, tenggiri dan lain-lain. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026 dengan usaha dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat, terutama dalam pendataan nilai ekspor.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Gambaran capaian nilai ekspor dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Tinggi, Sangat Tinggi dan menjadi sangat rendah. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.8 Perkembangan Nilai ekspor Tahun 2020 - 2025

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa nilai ekspor meningkat tajam dari 2020 sd 2023 dan mengalami penurunan tajam pula di tahun 2024 dan 2025. Terjadinya nilai yang fluktuatif ini disebabkan karena skala produksi dan kontinuitas pasokan perikanan ekspor dari Sumatera Barat belum stabil dan masih bersifat musiman, hasil ekspor sering diregistrasi dari pelabuhan/provinsi lain karena komoditas dialirkan ke pusat lain dan ekspor dari Sumatera Barat dominan produk tuna atau beberapa komoditas utama saja, sehingga kurang diversifikasi pasar dan produk. Ini dapat membuat eksportir rentan jika permintaan / harga komoditas tertentu berfluktuasi di pasar internasional.



Grafik menunjukkan bahwa realisasi nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2020–2023, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2020 nilai ekspor tercatat sebesar 165,12, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 230,62. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 272,35, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 291. Tren kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri, permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan daerah, serta dukungan terhadap sektor produksi dan distribusi ekspor.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai ekspor mengalami **penurunan signifikan menjadi 159,66**, dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi **80**. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti melemahnya permintaan pasar global, fluktuasi harga komoditas ekspor, gangguan rantai pasok, kebijakan perdagangan internasional, maupun faktor produksi di tingkat daerah. Selain itu, kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga dapat berdampak pada penurunan volume maupun nilai ekspor.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat hingga tahun 2023, namun diperlukan **strategi penguatan sektor ekspor, diversifikasi komoditas, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar internasional** agar nilai ekspor dapat kembali meningkat dan lebih stabil pada tahun-tahun mendatang.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025*	Realisasi Nasional Tahun 2025*	Ket (+/-)
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	80	-	+

*angka sementara Sumber : DKP, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Untuk nilai ekspor nasional data belum kami dapatkan karena masih dalam penghitungan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Sumatera Barat.



Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegagalan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) sebesar 80 (milyar) dengan tingkat capaian 50% dengan capaian Sangat rendah, hal ini adalah karena berbagai faktor penyebab, tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan tahun 2025 dari target 160 M dengan realisasi 80 M (capaian 50%) disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah :

1. Data ekspor resmi adalah data rekapan dari Balai Karantina, sementara ada pelaku usaha yang melakukan ekspor langsung via darat dan tidak terdata secara resmi. Hal ini menyebabkan nilai ekspor tersebut tidak tercatat sebagai ekspor asal Sumatera Barat, meskipun bahan bakunya berasal dari perairan Sumatera Barat. Akibatnya, kontribusi perikanan Sumatera Barat dalam statistik ekspor provinsi menjadi tampak kecil.
2. Struktur komoditas ekspor perikanan Sumatera Barat masih didominasi produk segar atau beku dengan nilai tambah rendah. Keterbatasan industri pengolahan hasil perikanan menyebabkan belum optimalnya pengembangan produk olahan bernilai tinggi seperti fillet siap saji, produk kaleng, maupun produk olahan modern yang memiliki daya saing lebih besar di pasar internasional.
3. Skala produksi dan kontinuitas pasokan perikanan ekspor dari Sumatera Barat belum stabil. Produksi yang masih bersifat musiman, ketergantungan pada cuaca, serta keterbatasan armada dan teknologi penangkapan menyebabkan volume dan kualitas pasokan sulit dipertahankan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar ekspor.
4. Tidak adanya permintaan dari Hongkong dan China untuk ikan kerapu, sehingga ikan kerapu sama sekali tidak ada yang di ekspor di tahun 2025.
5. Adanya penyakit di udang vaname sehingga udang vaname tidak bisa di ekspor karena tidak memenuhi persyaratan.
6. Adanya swasembada pangan di negara tujuan ekspor sehingga tidak ada nya permintaan ekspor.
7. Banyak tangkapan yang di jual pelaku pemasaran untuk lokal saja dan hasil tangkapan ikan ekspor tahun ini jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.
8. Keterbatasan infrastruktur pendukung ekspor masih menjadi kendala, terutama terkait cold storage, fasilitas rantai dingin (cold chain) dan layanan logistik langsung ke pasar ekspor. Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi



menjadi tinggi dan menurunkan daya saing produk perikanan Sumatera Barat di pasar global.

9. Akses pasar dan jejaring ekspor langsung yang masih terbatas membuat pelaku usaha perikanan Sumatera Barat lebih banyak bergantung pada trader atau eksportir dari luar daerah. Kondisi ini tidak hanya mengurangi nilai ekspor yang tercatat di daerah, tetapi juga membatasi posisi tawar pelaku usaha lokal dalam rantai perdagangan global.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Mempromasikan hasil - hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada kelompok pengolah dan pemasar.

Adapun **hambatan** yang ditemui dalam meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan yaitu:

1. Belum terpenuhinya kuota produk yang akan diekspor.
2. Keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal.
3. Masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standard.
4. Pemberlakuan standar oleh masing-masing negara tidak sejalan dengan yang diterapkan di beberapa industri, sehingga hal ini kadang kala menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan Indonesia di negara importir.

Beberapa **upaya ke depan** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

1. Standarisasi dan sosialisasi produk ekspor hasil perikanan.
2. Peningkatan sarana pemasaran ikan.
3. Peningkatan investasi dan memfasilitasi akses permodalan untuk pelaku usaha.
4. Peningkatan promosi dan pemasaran produk dengan mengikuti pameran.
5. Perbaikan mekanisme pemberian izin.
6. Pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan.
7. Menerapkan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam penentuan strategi peningkatan ekspor



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai Ekspor Hasil Perikanan* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.31. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan nilai ekspor hasil perikanan	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program	Mendorong investor melakukan investasi terhadap pelaku usaha perikanan
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(124.303.760 \times 50\%) - 111.872.960}{111.872.960} \times 100\% = -0,40$$



Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi -0,46 maka **nilai efisiensi** adalah 0%.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi -0,40 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja meningkatnya pemasaran produk perikanan, diperoleh nilai efisiensi 0% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Nilai minus disini berarti inefisiensi. Maka inefisiensi adalah tidak maksimalnya pemanfaatan yang diberikan bila dibandingkan dengan ketersediaan SDM, anggaran dan sarana prasarana, tidak ada peningkatan atau rendahnya nilai. Fungsi lainnya adalah kemampuannya untuk menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan rendah.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemasaran produk perikanan adalah sebesar Rp. 124.303.760,- dan terealisasi Rp. 111.872.960,- (90%).

Tabel 3.32 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	1	124.303.760	111.872.960
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	124.303.760	111.872.960



Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	124.303.760	111.872.960	90,00	100	12.430.800
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.303.760	111.872.960	90	100	12.430.800
2.1	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD PPMHP]	74.303.760	62.509.600	84,13	100	11.794.160
2.3	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	50.000.000	49.363.360	98,73	100	636.640

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 124.303.760,- terealisasi sebesar Rp 111.872.960,- atau 90%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 12.430.800,- (10%) yang berasal dari sisa kontrak dan sisa kegiatan. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pemasaran produk perikanan (50%) lebih rendah dari realisasi anggaran (90%) dengan tingkat efisiensi -0,40.

Anggaran sebesar Rp. 124.303.760,- berada pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 2 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, tetapi pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan secara langsung belum menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan* secara signifikan. Dibutuhkan usaha dan kerja keras bersama dengan lintas sektor dalam pendataan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat agar potensi ekspor perikanan Sumatera Barat dapat tergambarkan secara akurat, jelas dan nyata, karena akurasi data lokal sering kurang karena ekspor sering tercatat lewat daerah lain.

**Sasaran 4** | **Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan**

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan dan kedua sebagai penyanggah (buffer) bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produk perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

Meningkatnya produksi olahan perikanan merupakan indikator positif dari berkembangnya sektor perikanan secara menyeluruh, khususnya pada aspek hilirisasi. Kenaikan ini menunjukkan bahwa hasil perikanan tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tetapi semakin banyak diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ikan beku, fillet, abon, nugget, bakso ikan, kerupuk, hingga produk olahan siap saji.

Peningkatan produksi olahan perikanan didorong oleh beberapa faktor utama. Pertama, ketersediaan bahan baku yang relatif stabil, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya, memungkinkan unit pengolahan berproduksi secara berkelanjutan. Kedua, meningkatnya kapasitas dan jumlah unit pengolahan ikan (UPI), termasuk usaha mikro dan kecil, yang semakin aktif mengembangkan diversifikasi produk olahan.

Selain itu, dukungan kebijakan dan program pemerintah turut berperan penting, antara lain melalui fasilitasi perizinan, bantuan sarana prasarana pengolahan, pelatihan teknologi pengolahan, serta pendampingan penerapan standar mutu dan keamanan pangan. Upaya ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi olahan perikanan.

Faktor lainnya adalah meningkatnya permintaan pasar, baik pasar domestik maupun ekspor, terhadap produk olahan perikanan yang praktis, higienis, dan



memiliki daya simpan lebih lama. Perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah produk siap olah dan siap saji turut memacu peningkatan produksi olahan perikanan.

Secara keseluruhan, meningkatnya produksi olahan perikanan mencerminkan keberhasilan penguatan rantai nilai perikanan, peningkatan nilai tambah produk, serta kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha dan penciptaan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan. Kondisi ini juga mendukung ketahanan pangan dan daya saing produk perikanan daerah di tingkat nasional maupun global.

Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu " Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan dengan indikator kinerja yaitu : Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan target 2,05 %.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran nilai ekspor hasil perikanan adalah berpedoman kepada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend capaian kinerja dan anggaran selama tahun 2025.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.33 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase peningkatan produksi olahan Hasil Perikanan	2,05	2,15	104,88	<p>a. Target 2,05 %</p> <p>b. Realisasi Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2025 sebesar 6.982,1 ton sehingga persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar :</p> $\frac{\text{Realisasi Thn 2025} - \text{Realisasi Thn 2024}}{\text{Realisasi Tahun 2024}} \times 100\%$ $= \frac{6.982,10 \text{ ton} - 6.835,01 \text{ ton}}{6.835,01 \text{ ton}} \times 100\%$ $= \frac{147,09}{6.835,01} \times 100\% = 2,15 \%$ <p>c. Maka persentase Capaian yaitu :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$ </div> $= \frac{2,15}{2,05} \times 100 = 104,88 \%$

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 target dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan target sebesar 2,05% dan terealisasi sebesar 2,15 % dengan tingkat capaian sebesar 104,88% termasuk kategori Sangat Tinggi.

Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan merupakan penghitungan besarnya penghitungan produksi olahan hasil perikanan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu (sebelumnya) dikali 100%.

Capaian pada indikator kinerja Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2025 sebesar 6.982,10 ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 6.835,01 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing - masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.



Tabel 3.34 Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Tahun 2024 -2025

No.	Kab/Kota	Produksi (ton)	
		2024	2025
01	Kab. Kep. Mentawai	100,86	129,1
02	Kab. Pesisir Selatan	117	210,0
03	Kab. Solok	77,98	74,0
04	Kab. Sijunjung	10,41	10,6
05	Kab. Tanah Datar	2,24	16,3
06	Kab. Padang Pariaman	191	197,8
07	Kab. Agam	715,03	732,5
08	Kab. Lima Puluh Kota	388,38	395,9
09	Kab. Pasaman	92,53	82,4
10	Kab. Solok Selatan	1,99	1,4
11	Kab. Dharmasraya	1,66	3,0
12	Kab. Pasaman Barat	4739,51	4.726,0
13	Kota Padang	79,37	85,8
14	Kota Solok	19,70	19,5
15	Kota Sawahlunto	3,17	3,4
16	Kota Padang Panjang	21,205	8,8
17	Kota Bukittinggi	0,62	2,5
18	Kota Payakumbuh	19,41	22,7
19	Kota Pariaman	253,605	260,4
	TOTAL	6.835,10	6.982,01

*Angka sementara Sumber : DKP,2025

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable). Pemberian bantuan sarana pengolahan dan pemasaran yang diberikan pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan.



Tabel 3.35 Rekapitulasi Jumlah Bantuan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025

NO	JENIS BANTUAN	KABUPATEN / KOTA					TOTAL
		PADANG	PARIAMAN*	PASAMAN BARAT	AGAM	PADANG PARIAMAN*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fish box 100 Liter		7	40	130	10	187
2	SPG Roda 3		1	1	4	7	13
3.	Freezer	1					1
TOTAL		1	8	41	134	17	201

Dari tabel dapat dilihat bahwa bantuan sarana pengolah dan pemasaran produk hasil perikanan tahun 2025 ini mengalami penurunan karena efisiensi anggaran, tetapi diharapkan dengan adanya bantuan ini tetap dapat mendorong peningkatan produksi olahan pada masing-masing Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada oleh kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar).









Peluang untuk meningkatkan produksi olahan hasil perikanan selain memberikan bantuan adalah :

1. Ketersediaan Bahan Baku yang Melimpah. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang terus meningkat membuka peluang besar bagi pengembangan industri pengolahan. Dengan pasokan ikan yang stabil, unit pengolahan dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya Permintaan Pasar. Permintaan terhadap produk olahan perikanan terus tumbuh, baik di pasar domestik maupun ekspor. Tren konsumsi masyarakat yang mengarah pada produk praktis, siap masak, dan siap saji menjadi peluang utama untuk meningkatkan volume dan ragam produk olahan.
3. Pengembangan Diversifikasi Produk. Masih terbuka peluang luas untuk pengembangan berbagai jenis olahan bernilai tambah seperti frozen food,



produk berbasis surimi, abon ikan, olahan ikan asap, hingga produk inovatif berbasis kearifan lokal. Diversifikasi ini dapat meningkatkan daya saing dan menyerap lebih banyak bahan baku.

4. Dukungan Program dan Kebijakan Pemerintah. Adanya program bantuan sarana prasarana pengolahan, pelatihan UMKM, fasilitasi perizinan, sertifikasi mutu, serta pendampingan pemasaran menjadi peluang strategis untuk mendorong peningkatan produksi olahan perikanan.
5. Perkembangan Teknologi Pengolahan dan Pengemasan. Kemajuan teknologi pengolahan, pengawetan, dan pengemasan memungkinkan produk perikanan memiliki daya simpan lebih lama dan kualitas lebih baik. Teknologi ini membuka peluang peningkatan kapasitas produksi sekaligus perluasan jangkauan pasar.
6. Peluang Akses Pasar Digital. Pemanfaatan platform digital dan e-commerce memberikan peluang bagi pelaku usaha olahan perikanan untuk memasarkan produk secara lebih luas dan efisien, tanpa harus bergantung pada pasar lokal semata.
7. Penguatan Kemitraan Usaha. Terbukanya peluang kerja sama antara nelayan, pembudidaya, unit pengolahan, koperasi, dan sektor swasta dapat menjamin kontinuitas bahan baku serta meningkatkan skala produksi olahan perikanan.
8. Peningkatan Kesadaran Konsumsi Ikan. Kampanye gemar makan ikan dan kesadaran masyarakat terhadap gizi dan kesehatan mendorong peningkatan konsumsi produk perikanan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan produk olahan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran 4 ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025*		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Olahan Hasil Perikanan	7,26	7,5	103,30	7,95	8,15	102,52	2,05	2,15	104,88

*angka sementara Sumber : DKP, 2025



Jika dilihat dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan perikanan, indikator kinerjanya meningkat di tahun 2024 dan mengalami penurunan di tahun 2025. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.37 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi*	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,15	11	19,55

*Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan Tahun 2025 sebesar 2,15 % dengan capaian sebesar 19,55% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 11 %.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif, mulai dari interval Tinggi sampai Sangat Tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja tersebut belum ada. Perkembangan indikator tersebut



dapat dilihat pada grafik 3.9 sebagai berikut:



Berdasarkan data yang disajikan pada grafik, persentase produksi olahan perikanan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2022, persentase produksi olahan tercatat sebesar 10,03%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut sektor pengolahan perikanan berada dalam kondisi yang relatif baik dan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan persentase menjadi 7,5%. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan produksi olahan perikanan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan bahan baku, menurunnya permintaan pasar, maupun kendala dalam proses distribusi dan pemasaran produk olahan.

Pada tahun 2024, persentase produksi olahan mengalami sedikit peningkatan menjadi 8,15%. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya pemulihan dalam sektor pengolahan perikanan, meskipun peningkatannya belum cukup signifikan untuk kembali ke tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam tahap penyesuaian dan belum sepenuhnya stabil.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat tajam hingga mencapai 2,15%, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih serius dalam sektor pengolahan perikanan, seperti terganggunya pasokan



bahan baku, menurunnya kapasitas produksi, atau melemahnya daya serap pasar terhadap produk olahan, minimnya inovasi dan diversifikasi produk dimana sebagian besar produk olahan masih konvensional (ikan asin, pindang, abon, kerupuk) membuat daya saing rendah dan pertumbuhan melambat, banyak unit pengolahan ikan (UPI) masih menggunakan teknologi sederhana dan dampak dari pasca pandemi disusul musibah banjir bandang juga ikut mempengaruhi kinerja industri pengolahan sehingga persentase kenaikannya menurun setiap tahun.

Secara keseluruhan, perkembangan persentase produksi olahan perikanan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022-2025 menunjukkan bahwa sektor ini masih belum stabil dan rentan terhadap berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis, seperti peningkatan teknologi pengolahan, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pasar, guna mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor pengolahan perikanan di masa mendatang.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.38 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025*	Realisasi Nasional Tahun 2023*	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,15	-	+

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Untuk Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan nasional data belum kami dapatkan karena masih dalam penghitungan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Sumatera Barat.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 2,15% dengan tingkat capaian 104,88% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai *upaya* yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:



1. Mempromasikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat,
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan kepada masyarakat,
3. Memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan dari Sumatera Barat, mengadakan lomba masak menu serba ikan, gemarikan dan lain-lain,
4. Meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota.

Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan yaitu :

1. SDM pengolah kurang
2. Masyarakat masih banyak menyukai komoditi lain untuk dikonsumsi seperti ragam menu dari ayam dan daging masih lebih diminati oleh masyarakat.
3. Belum seluruhnya masyarakat mengkonsumsi ikan sesuai dengan standar yang seharusnya.

Beberapa ***upaya ke depan*** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan produksi olahan hasil perikanan antara lain :

1. Memanfaatkan potensi perikanan dan perkembangan teknologi, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas.
2. Diversifikasi produk olahan hasil perikanan.
3. Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.
4. Peningkatan SDM pelaku usaha pengolahan hasil perikanan
5. Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Peningkatan peran pemda dalam pengembangan produk dan pemasaran olahan hasil perikanan dan membangun kemitraan dengan pihak swasta.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan persentase produksi olahan hasil perikanan.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.



Tabel 3.39. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program	Mendorong investor melakukan investasi terhadap pelaku usaha perikanan
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(669.712.000 \times 104,88\%) - 647.336.005}{647.336.005} \times 100\% = 0,08$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi 0,08 maka *nilai efisiensi* adalah 70,55%.



Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi 0,08 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja meningkatnya pemasaran produk perikanan, diperoleh nilai efisiensi 70,55% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi olahan hasil perikanan adalah sebesar Rp. 669.712.000,- dan terealisasi Rp. 647.336.005,- (96,66%).

Tabel 3.40 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 4

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	1	669.712.000	647.336.005
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	669.712.000	647.336.005

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	669.712.000	647.336.005	96,66	100	22.375.995
1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	669.712.000	647.336.005	96,66	100	22.375.995
1.1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	669.712.000	647.336.005	96,66	100	22.375.995

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 669.712.000,- terealisasi sebesar Rp 647.336.005,- atau 96,66%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 22.375.995,- (3,34%) yang berasal dari sisa kontrak dan sisa kegiatan. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja



sasaran meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (104,88%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,66%) dengan tingkat efisiensi 0,08.

Anggaran sebesar Rp. 669.712.000,- berada pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 1 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan*.

2.	Tujuan 2	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan
----	----------	--

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources), sumberdaya alam tidak dapat pulih (non-renewable resources), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar.

Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

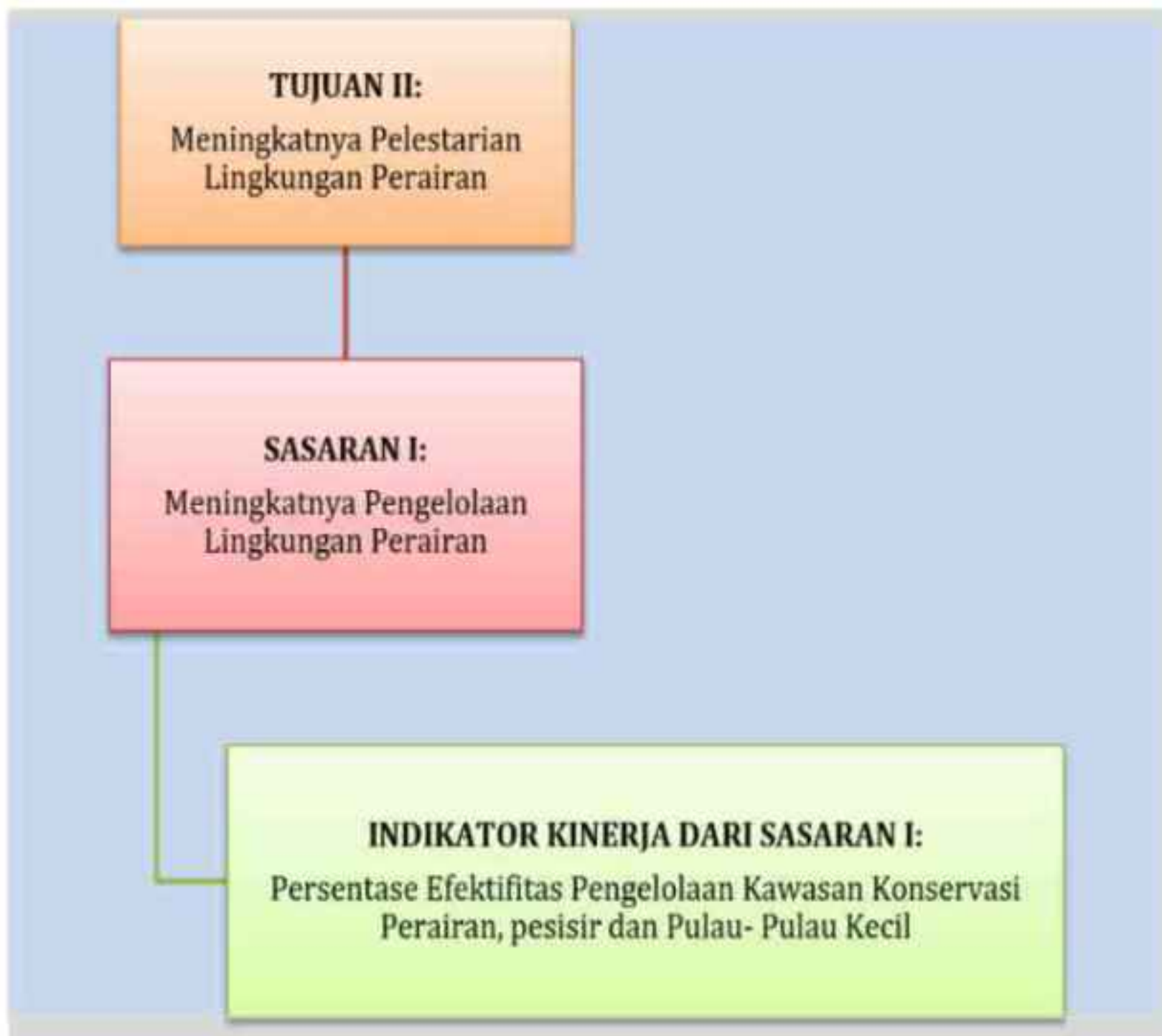
Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis



penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan. Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khusus.

Tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dengan indikator tujuan terdiri dari : Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Perairan.

Tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.10 Tujuan II dan 1 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pelestarian Lingkungan Perairan yang telah ditetapkan dengan 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 1 sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1** **Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan**

Dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang optimal serta berkelanjutan, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir Sumatera Barat. Pengelolaan kawasan konservasi ini merupakan salah satu upaya strategis nasional sektor kelautan karena upaya ini mempunyai kaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya maupun aspek lingkungan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dan/atau perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional. Kawasan Daerah dengan kriteria berada di Perairan Pesisir, diluar yang menjadi kewenangan Menteri.

Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu :

1. Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.
2. Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan
3. Alokasi sumberdaya (input), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan
4. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses)



5. Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan
6. Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB V. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah yang berciri kepulauan. Pada Pasal 27 Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi : a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Melalui Pergub No. 109 tahun 2017 UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP ditunjuk sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Perairan di wilayah Sumatera Barat.

Dari tujuh kawasan, 6 (enam) kawasan sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan pada tahun 2023 ini, kawasan ke 7 ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 126 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam di Provinsi Sumatera Barat. Ke tujuh kawasan konservasi tersebut adalah Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pesisir Selatan, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Padang, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Pariaman, Kawasan Konservasi Batang Gasan di Perairan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kawasan Konservasi di perairan di Wilayah Kabupaten Agam.

Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Sumatera Barat di kelola dengan sistem zonasi yang berpedoman kepada (Permen KP No.31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi) yang meliputi :

1. Zona Inti

Ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.

Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.



Zona inti mempunyai fungsi :

- a. perlindungan sumber daya genetik;
 - b. habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi: daerah pemijahan, daerah asuhan dan daerah mencari makan.
 - c. pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan;
 - d. pemulihan biota dan habitat;
 - e. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau
 - f. perlindungan cagar budaya.
2. Zona pemanfaatan terbatas
ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar Kawasan Konservasi.
3. Zona lain sesuai peruntukan
Merupakan kawasan merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas seperti : zona rehabilitasi, zona bangunan dan instalasi laut, zona Pelabuhan/tambat labuh, zona jalur lalu lintas kapal, zona religi/situs budaya; dan/atau zona sesuai karakteristik kawasan.

Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.41 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1.	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	64,71	59,74	92,32

Sumber : DJPKRL-KKP, 2025

Tabel 3.42 Hasil Perhitungan Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Cara Penghitungan
1.	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	64,71	59,74	92,32	<p>Target 64,71 %</p> <p>Hasil penilaian Evika berdasarkan Berita Acara Pleno di Bogor bulan Desember 2025, Realisasi persentase evika adalah 59,74%</p> <p>Maka Persentase capaian kinerja sebesar :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$ </div> $= \frac{59,74}{64,71} \times 100\%$ $= 92,32 \%$

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 target dari indikator kinerja persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target sebesar 64,71% dan terealisasi sebesar 59,74% dengan tingkat capaian sebesar 92,32% termasuk kategori Sangat Tinggi.

Rincian hasil penilaian persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel 3.43 berikut :



NO	KAWASAN KONSERVASI DAERAH	NILAI EVIKA % 2025	STATUS PENGELOLAAN
1	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai	67,73	DIKELOLA OPTIMUM
2	Pesisir Selatan	57,57	DIKELOLA OPTIMUM
3	Padang	52,20	DIKELOLA OPTIMUM
4	Pariaman	83,22	DIKELOLA OPTIMUM
5	Batang Gasan Padang Pariaman	74,48	DIKELOLA OPTIMUM
6	Pulau Panjang, Pasaman Barat	64,27	DIKELOLA OPTIMUM
7	Agam	18,73	DIKELOLA MINIMUM
	RATA-RATA	59,74	DIKELOLA OPTIMUM

Sumber : DJPKRL-KKP, 2025

Alat ukur penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dituangkan dalam **Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/Kep-DJPRL/2020** tentang **Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi**. Seluruh teknis penilaian evaluasi mulai dari pembentukan Tim Penilai, Penyusunan Rencana Kerja Penilaian, Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen, Penilaian dan Verifikasi, Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi, sampai dengan tata cara Pelaporan semuanya jelas tertuang dalam peraturan tersebut.

Proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, verifikasi hingga penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, seperti tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 3.11 Proses Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



Proses penilaian dilakukan melalui sebuah forum diskusi terbuka. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator-fasilitator yang memahami tentang proses penilaian Efektivitas pengelolaan. Diskusi ini dihadiri pihak-pihak yang telah diidentifikasi pada tahap prakondisi dan diundang oleh pengelola kawasan.

Penilaian Evika tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 5-8 November 2025 di Kuta Paradiso Hotel Bali. Evaluasi dan verifikasi Penilai Evika dilakukan terhadap 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sumatera Barat, yaitu KKPD Selat Bunga Laut, KKPD Pesisir Selatan, KKPD Padang, KKPD Pariaman, KKPD Batang Gasan di Padang Pariaman, KKPD Pulau Panjang di Pasaman Barat, dan KKPD Agam. Penilaian Evika Pada tahun 2025 ini adalah hasil kegiatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan selama tahun 2024. Pada saat evaluasi penilaian Evika tahun 2025 tim penilai Evika Sumatera Barat yang berada pada Tim 2 dengan Tim Penilai :

1. Ibu Leny Dwiastuti dari KKP (Ketua Tim 2)
2. Bapak Badri Thoha dari Kemendagri
3. Ibu Sherli Yusnitawati dari Bappenas
4. Ibu Noberta Oktaviana dari KKP

Pada Penilaian Evika Tim penilai melakukan penilaian melalui verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) dan unit kerja terkait. Verifikasi dilakukan melalui konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari para pihak yang terlibat dalam pengelolaan.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan atau diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

Kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi ini adalah:

- a) Kriteria Input
Status Kawasan, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana (Sarpras).
- b) Kriteria Proses
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Pengawasan, Penjangkauan (Outreach), Kemitraan, Pemantauan Sumber Daya Kawasan, Pengelolaan



Sarana dan Prasarana, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional).

c) Kriteria Ouput

Pemanfaatan Terkendali, Ancaman, Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), Data dan Informasi.

d) Kriteria Outcome

Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona Inti, Kondisi Sosial Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional).

Berdasarkan hasil Penilaian EVIKA tahun 2025 yang dilakukan untuk mengukur kinerja pengelolaan tahun 2024 dari Berita Acara Hasil Penilaian Evika tahun 2024 pengelolaan kawasan Konservasi Di Sumatera Barat dari 7 KKPD terdapat 6 Kawasan dengan status **Perak (dikelola Optimum)**, 1 Kawasan **Perunggu (dikelola minimum)**.





Dengan adanya kegiatan di atas, capaian pada indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil penilaiannya diperoleh dari 7 kawasan konservasi meningkat dengan kategori Sangat Tinggi.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2025 telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan diantaranya terdapat satu kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2018, empat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2021 dan satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023.

Ada tujuh kawasan konservasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Organisasi Pengelola UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP), yaitu dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.44 Lokasi Kawasan Konservasi Pemerintah Daerah

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	No. SK	Luas Kawasan (Ha)	Target Konservasi
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	Kepmen KP No. 22 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018	129.566,00	Mangrove, Terumbu Karang, Ikan Balong Padang, Napoleon
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 104 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	175.583,56	Terumbu Karang dan Penyu
3.	Kota Padang	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 105 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	2.188,70	Terumbu Karang
4.	Kota Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 106 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	11.778,22	Terumbu Karang dan Penyu
5.	Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 107 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	735,93	Terumbu Karang dan Penyu
6.	Kabupaten Pasaman Barat	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 2 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022	6.122,14	Terumbu Karang
7.	Agam	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 126 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023	6.535,98	Terumbu Karang
Jumlah ditetapkan				332.510,53	

Sumber : DKP, 2025

Pada setiap Kawasan Konservasi yang pengelolaannya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka akan dilakukan Verifikasi dan Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut.

Pada tahun 2025 ini, sudah seluruh tujuh Kawasan Konservasi dilakukan Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Teknis penilaian EVIKA tahun 2025 ini sama seperti tahun sebelumnya. Berdasarkan Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah dilaksanakan pada bulan November 2025, Tujuh Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sudah **Dikelola Optimum** dengan Rata-rata persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2025 yaitu **59,74%**.



Adapun sarana dan prasarana pada 6 kawasan konservasi daerah di Sumatera Barat serta 2 Konservasi Jenis yaitu :



1. KKD SELAT BUNGA LAUT KAB.KEPULAUAN MENTAWAI



2. INSTALASI KKD PESISIR SELATAN



3. INSTALASI KKD KOTA PADANG



4. INSTALASI KKD KOTA PARIAMAN



5. INSTALASI KKD BATANG GASAN



6. INSTALASI KKD PASAMAN BARAT



7. INST. KONSERVASI JENIS IKAN SUNGAI DI SICINCIN



8. INSTALASI KONSEVASI DANAU SINGKARAK

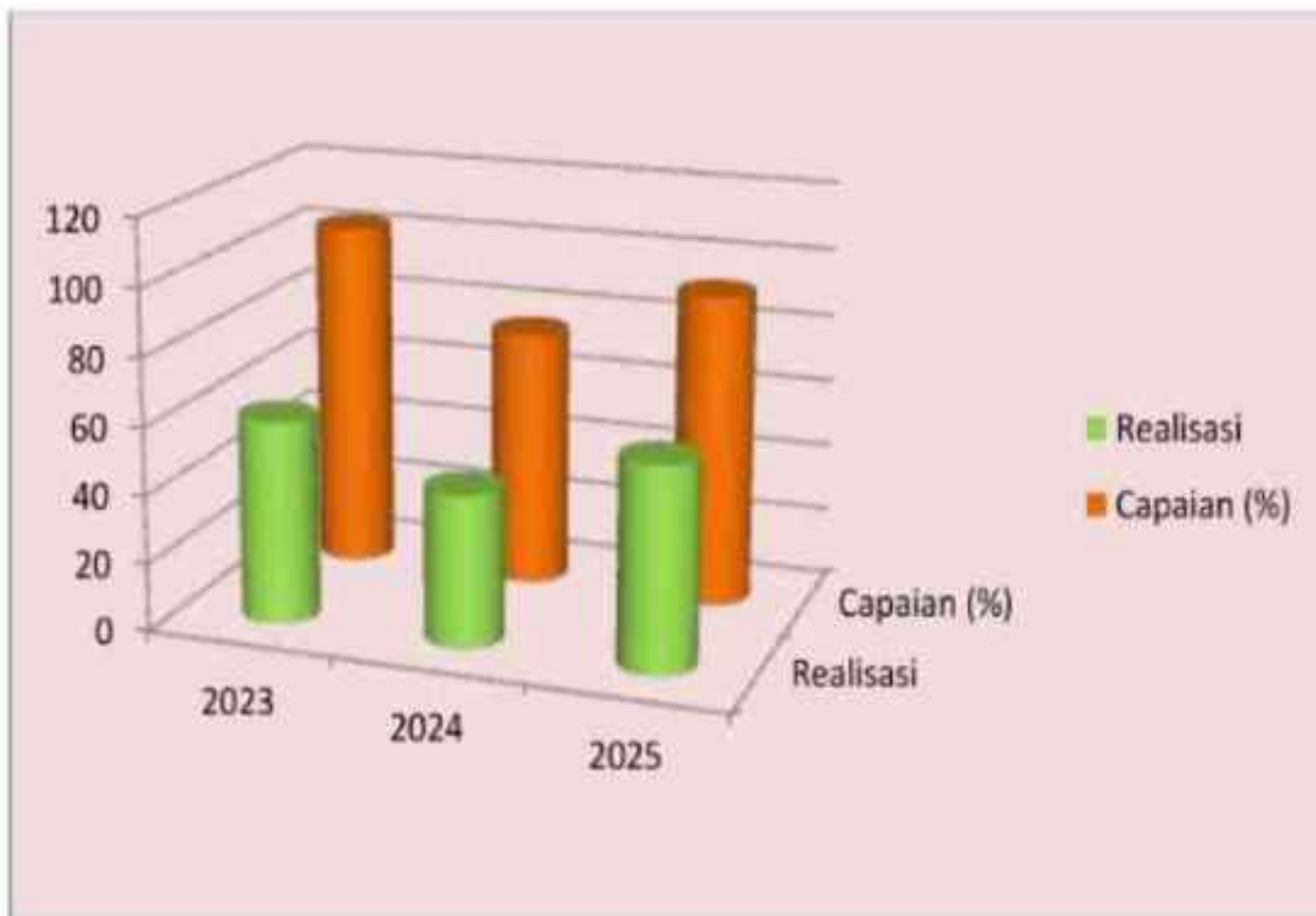
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Capaian Indikator sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.45 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan Tahun 2023 - 2025

No	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	52,94	59,75	103,30	58,82	44,73	76,04	64,17	59,74	92,32

Realisasi 2025 jika dibandingkan dengan 2024 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun belakangan mengalami kinerja fluktuasi, di tahun 2024 mengalami penurunan 15,02 poin dari tahun 2023 dan di tahun 2025 mengalami peningkatan 15,01 poin dari tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.46 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	59,74	70,59	84,63%

Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2025 sebesar 59,74 telah mencapai 84,63% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 70,59%. Jika dibandingkan dengan Renstra dan jika dilihat beberapa tahun sebelumnya yang berfluktuasi, tetap optimis bisa mencapai target akhir Renstra.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil terus menunjukkan kinerja fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

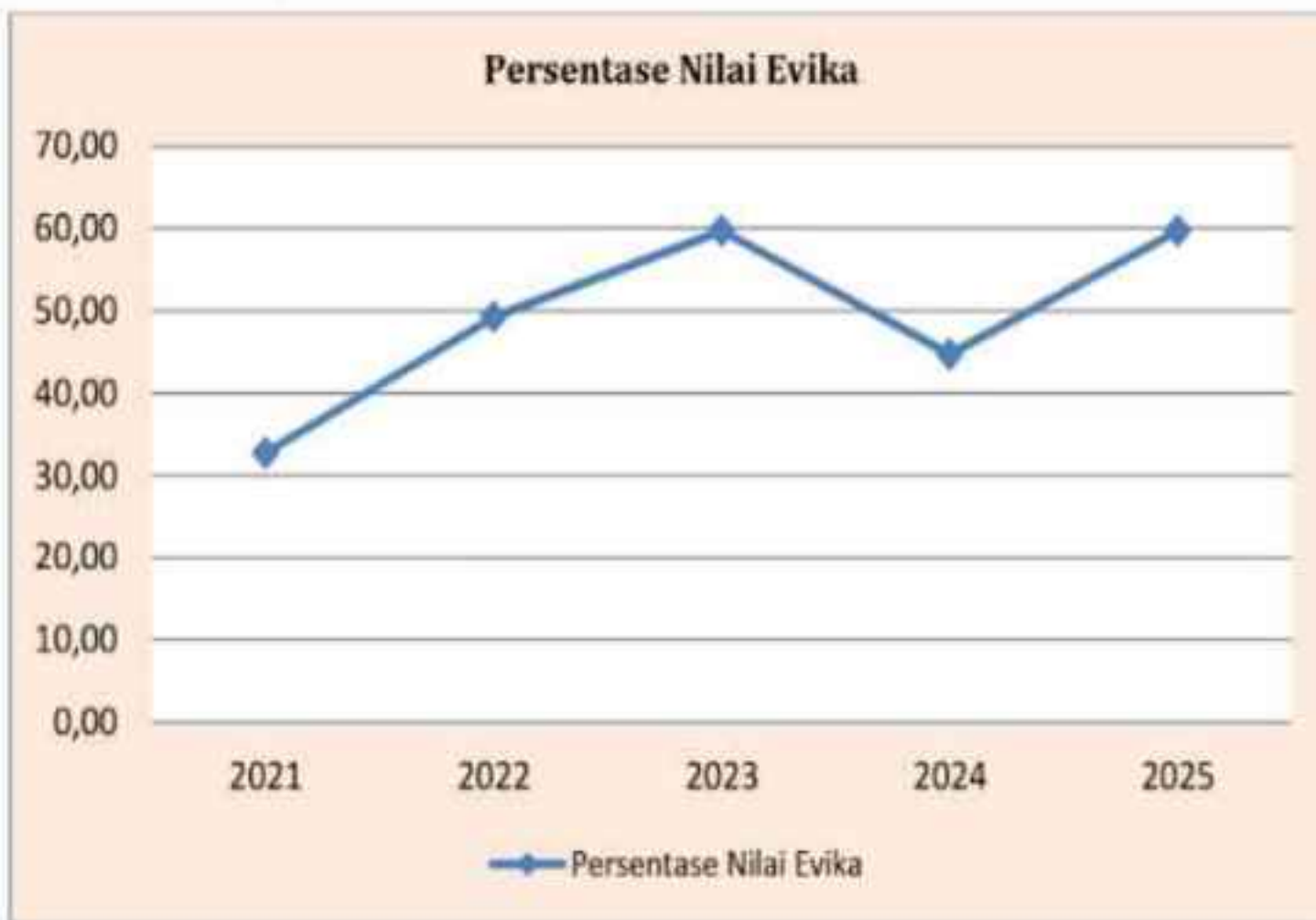


Tabel 3.47 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	32,74	49,26	59,75	44,73	59,74

Sumber : DKP, 2025

Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 16,52 dan terendah terjadi penurunan di tahun 2024 sebesar 15,02. Perkembangan nilai persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik :



Dari grafik di atas, persentase nilai evika dari tahun 2020 sd tahun 2023 mengalami trend naik, tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan dan kenaikan kembali di tahun 2025. Fluktuasi nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di Sumatera Barat periode 2020-2025 mencerminkan dinamika pengelolaan yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, pembiayaan, kondisi ekologis dan sistem evaluasi. Tren kenaikan 2020-2023 menunjukkan penguatan tata kelola kawasan, penurunan di 2024 mengindikasikan adanya tantangan teknis dimana 1 kawasan KKPD yaitu KKPD Agam belum terkelola optimum karena baru ditetapkan pada



tahun 2023 dan efisiensi anggaran turut berpengaruh terhadap pemenuhan data dukung pengelolaan kawasan konservasi perairan seperti kegiatan monitoring dan pendataan biofisik yang dibutuhkan secara berkala. Keterbatasan anggaran pengelolaan kawasan yang masih bergantung pada APBD, juga perlu mendapat perhatian, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan lainnya seperti kerjasama dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahun 2025 terjadi kenaikan kembali dan hal ini menegaskan adanya upaya perbaikan dan adaptasi kebijakan pengelolaan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.47 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025	Ket (+/-)
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	59,74	79,46	+

Sumber : BA Pleno Hasil Evika Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Target Pengelolaan Evika Tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah 64,71% dengan realisasi 59,74 % (capaian 92,32%) yang berarti tidak mencapai target. Dari target Nilai Evika terdapat 3 kawasan yang dikelola di bawah target penilaian evika, diantaranya KKPD Agam, KKPD Kota Padang KKPD Pesisir Selatan.

Beberapa penyebab tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan kawasan pada Kabupaten Agam belum dilaksanakan, karena tidak ada sarana prasarana, dan tidak tersedianya SDM Penjaga Kawasan pada KKPD Agam yang baru ditetapkan pada tahun 2023.
2. Belum maksimalnya kegiatan monitoring dan pendataan biofisik yang dibutuhkan secara berkala pada kawasan konservasi karena efisiensi anggaran kegiatan.
3. Belum maksimalnya kegiatan pendataan sosial ekonomi masyarakat kawasan, serta sosialisasi dan penyadartahuan masyarakat karena minimnya anggaran



pada setiap KKPD, penjangkauan masyarakat belum terstruktur dan terencana dengan baik didalam rencana pengelolaan kawasan konservasi.

4. Penetapan target Evika sebelumnya yang cukup tinggi, yang sangat jauh dari kondisi KKPD dan pengelolaannya. Pada penilaian Evika Tahun 2025 ini nilai EVIKA cukup mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Tahun 2024 .
5. Belum adanya Dokumen Rencana Pengelolaan KKPD yang menjadi arah pengelolaan KKPD, dan ini perlu untuk segera ditetapkan.

Walaupun secara hitungan, tidak mencapai target, tetapi keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 59,74% dengan tingkat capaian 92,32% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Penyusunan dan integrasi zonasi (RTRW dan RZWP3K / zonasi pesisir).
Menyelaraskan rencana zonasi wilayah pesisir/pulau kecil dengan Rencana Tata Ruang (RTRW), dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 tanggal 5 Juni 2025. Hal ini meningkatkan skor *input* dan *proses* pada penilaian EVIKA.
2. Pemantauan, pengawasan dan penegakan (patroli dan pengawasan wilayah).
Pelaksanaan patroli perairan, pengawasan kepatuhan zonasi, dan tindakan penegakan (sanksi administratif) untuk mengurangi ancaman sehingga memperbaiki indikator *ancaman* dan *tingkat kepatuhan* pada EVIKA.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pembentukan forum pengelola lokal.
Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola konservasi mandiri, pelatihan pengelolaan, dan pengembangan alternatif penghidupan (misal pariwisata konservasi, budidaya berkelanjutan). Pemberdayaan masyarakat meningkatkan indikator *proses* dan *outcome* EVIKA. Contoh : forum pelestarian penyu. Sumbar.
4. Rehabilitasi ekosistem (terumbu karang, mangrove, padang lamun).
Kegiatan transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan restorasi habitat untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam sehingga berdampak positif pada indikator *outcome*.



5. Sosialisasi pedoman teknis EVIKA terhadap aparaturnya.
Sosialisasi pedoman teknis EVIKA, pelatihan bagi pengelola kawasan daerah agar penilaian EVIKA dilakukan sesuai standar nasional sehingga skor akurat dan dapat ditingkatkan melalui perbaikan manajemen.
6. Kolaborasi multi-level (BPSPL, KKP, perguruan tinggi, LSM).
Kerjasama teknis dan penelitian dengan BPSPL Padang, universitas, dan LSM untuk pengukuran indikator, kajian ilmiah, serta pengembangan teknologi monitoring (misal survei terumbu/biomonitoring). Kolaborasi ini memperkuat bukti-bukti outcome.
7. Pelaporan dan evaluasi berkala menggunakan alat EVIKA.
Melakukan penilaian EVIKA berkala (input, proses, output, outcome) untuk mengetahui kelemahan spesifik dan menyusun prioritas perbaikan. Proses ini penting karena EVIKA juga menjadi dasar pemberian penghargaan/penilaian nasional.
8. Promosi kawasan sebagai destinasi pariwisata konservasi bertanggung jawab
Mengembangkan ekowisata terkontrol (dengan zonasi) untuk meningkatkan manfaat ekonomi lokal sekaligus mendorong pelestarian sehingga berdampak pada sustainability (outcome).

Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam upaya mencapai persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Hambatan pada Komponen *Input*
 - a. Keterbatasan anggaran pengelolaan. Dana untuk patroli, monitoring ekosistem, perbaikan sarana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sering tidak mencukupi. Ketergantungan pada APBN/APBD membuat keberlanjutan program tidak stabil.
 - b. Kekurangan SDM teknis dan pengelola kawasan. Jumlah pengawas perairan maupun tenaga teknis habitat (karang, mangrove, lamun) sangat terbatas. Banyak pejabat/pegawai belum tersertifikasi atau belum mengikuti pelatihan EVIKA terbaru.
 - c. Sarana dan prasarana yang belum memadai. Kapal patroli, alat selam, drone, dan peralatan monitoring biota tidak selalu tersedia atau tidak dalam kondisi baik. Fasilitas pos jaga di beberapa kawasan belum lengkap.



2. Hambatan pada Komponen *Proses*
 - a. Pengawasan dan patroli belum rutin dan tidak merata. Keterbatasan BBM, peralatan, dan petugas menyebabkan patroli tidak dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Aktivitas ilegal (penangkapan ikan destruktif, pelanggaran zonasi) masih terjadi.
 - b. Koordinasi antar-instansi belum optimal. Sinkronisasi antara DKP, BPSPL, pemerintah kab/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat kadang berjalan lambat. Pengambilan keputusan sering terhambat oleh perbedaan kewenangan.
 - c. Kepatuhan masyarakat masih rendah di beberapa lokasi. Kurangnya pemahaman manfaat konservasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengikuti aturan zonasi. Konflik pemanfaatan ruang (misalnya antara pariwisata, nelayan dan konservasi) masih muncul.
3. Hambatan pada Komponen *Output*
 - a. Dokumentasi kegiatan kurang lengkap. Laporan monitoring, foto kegiatan, catatan patroli, dan data ekologi sering tidak terdokumentasi dengan sistematis. Hal ini langsung menurunkan skor EVIKA karena penilaian berbasis bukti.
 - b. Minimnya data ekosistem yang bersifat *time-series*. Survei ekologi sering dilakukan sekali-sekali, bukan berkala, sehingga sulit mengevaluasi perubahan kondisi terumbu karang, mangrove, dan lamun.
4. Hambatan pada Komponen *Outcome*
 - a. Degradasi ekosistem masih berlangsung. Aktivitas perikanan tidak ramah lingkungan, sedimentasi pesisir dan perubahan iklim menyebabkan pemulihan ekosistem lambat.
 - b. Manfaat ekonomi belum terasa merata. Ekowisata, usaha alternatif, atau skema ekonomi produktif belum berfungsi optimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat konservasi.
 - c. Kurangnya mekanisme pembiayaan berkelanjutan. Belum banyak skema pendanaan non-APBD seperti CSR, hibah, atau skema konservasi berbasis insentif.



5. Hambatan Eksternal dan Struktural

- a. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Cuaca buruk menghambat patroli, monitoring, dan kegiatan rehabilitasi. Pemutihan karang (coral bleaching) serta badai menambah tekanan pada ekosistem.
- b. Tekanan pembangunan pesisir. Pembangunan fasilitas wisata, reklamasi, atau aktivitas industri dapat mempengaruhi kualitas habitat bila tidak terkontrol.

Beberapa *upaya tindak lanjut ke depan* yang dapat dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Meningkatkan alokasi anggaran berbasis prioritas EVIKA. Fokus pada pembiayaan kegiatan yang langsung menaikkan indikator EVIKA seperti patroli, monitoring ekologi, rehabilitasi, penyusunan dokumen, dan fasilitas pengawasan.
2. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM. Menambah pengawas perairan dan petugas teknis konservasi. Pelatihan EVIKA, survei ekologi, GIS, penyusunan rencana pengelolaan, dan penegakan aturan.
3. Penyediaan sarana prasarana strategis. Kapal patroli kecil-menengah, drone, alat selam, pos jaga, dan peralatan monitoring habitat.
4. Menetapkan jadwal patroli rutin dan sistem pelaporan digital. Patroli terencana berbasis risiko. Aplikasi/Google Form untuk catatan patroli, ancaman, dan pelanggaran yang langsung terdokumentasi.
5. Optimalisasi koordinasi lintas lembaga, dengan melaksanakan forum koordinasi antara DKP –BPSPL–KKP–polair–Kabupaten/Kota–nagari. Kemudian menetapkan SOP bersama untuk pengawasan, zonasi dan penanganan pelanggaran.
6. Peningkatan keterlibatan masyarakat seperti penguatan kelompok pengelola lokal, relawan konservasi, Pokmaswas, Pokdarwis dan melaksanakan program intensif edukasi zonasi dan konservasi.
7. Standarisasi dokumentasi dan bukti kegiatan, seperti membuat template baku untuk laporan patroli, monitoring, rehabilitasi, forum koordinasi, dan sosialisasi.



8. Pengumpulan data ekologi secara berkala dan terukur, seperti survey terumbu karang, lamun dan mangrove minimal 1-2 kali setahun serta melibatkan perguruan tinggi/Non-Governmental Organization (NGO) untuk memastikan kualitas data.
9. Program rehabilitasi ekosistem yang terukur, seperti melaksanakan transplantasi terumbu karang berbasis lokasi prioritas dan penanaman mangrove dengan skema pemeliharaan jangka panjang.
10. Pengembangan ekowisata konservasi, seperti wisata penyu, wisata edukasi mangrove dan skema pembagian manfaat untuk masyarakat agar dukungan konservasi meningkat.
11. Penguatan ekonomi alternatif, seperti budidaya perikanan ramah lingkungan, usaha UMKM berbasis hasil laut berkelanjutan dan dukungan pemasaran.
12. Pengembangan mekanisme pembiayaan berkelanjutan dengan menjalin kerjasama CSR, donor, perguruan tinggi, dan LSM serta menyiapkan proposal program konservasi multi-tahun.
13. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, seperti melakukan self-assessment EVIKA tahunan untuk melihat indikator yang masih rendah, menyusun "daftar pekerjaan per indikator" untuk fokus perbaikan tahun berikutnya dan mengadakan workshop EVIKA tingkat daerah secara rutin.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil .
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.



Tabel 3.48. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Kebutuhan terhadap Pendanaan/anggaran berkelanjutan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(900.819.595 \times 92,32\%) - 855.687.100}{855.687.100} \times 100\% \\ &= -0,03. \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi -0,03 maka **nilai efisiensi** adalah **43,33%**.



Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi -0,03 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja meningkatnya *Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan*, diperoleh nilai efisiensi 43,33%. dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan adalah sebesar Rp 900.819.595,- dan terealisasi Rp. 855.687.100,- (95%). Kegiatan ini didukung oleh dua program yaitu Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan anggaran Rp.448.614.745,- terealisasi sebesar Rp.410.990.050,- (91,61%) dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp.452.204.850,- terealisasi sebesar Rp.444.697.050,- (98,34%).

Tabel 3.49 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 5

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	2	900.819.595	855.687.100
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1	448.614.745	410.990.050
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1	452.204.850	444.697.050

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695



1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695
1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD - UPTD KPSDKP]	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695
Persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	452.204.850	444.697.050	98,34	100	7.507.800
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	452.204.850	444.697.050	98,34	100	7.507.800
1.1	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	225.326.900	225.307.300	99,99	100	19.600
1.2	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi [UPTD - UPTD KPSDKP]	226.877.950	219.389.750	96,7	100	7.488.200
Total		900.819.595	855.687.100	95,00	100,00	45.132.495

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 900.819.595,- terealisasi sebesar Rp 855.687.100,- atau 95,00%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 45.132.495,- (5%) yang berasal dari sisa honor petugas lapang UPTD dan sisa belanja. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan (92,32%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95%) dengan tingkat efisiensi -0,03.

Anggaran sebesar Rp. 900.819.595,- berada pada Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 3 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan*.



3.	Tujuan 3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani
----	-----------------	--

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani” dicapai dengan menetapkan dua indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Dari tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani maka ditetapkan juga dua sasaran strategis yaitu 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi .Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar 3.12 ini :



Gambar 3.12 Tujuan III dan 2 Sasaran Strategis

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun.

Pada dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Target untuk mengukur indikator tujuan sama dengan indikator sasaran yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 3.50.



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				2025	2025	2025
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80,54)	A (81,47)	101,15
	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (84)	B (85)	101,19

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran strategis 6 dan 7 pada tahun 2025 berhasil dicapai. Dimana capaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 81,47 dengan capaian 101,15% dan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 85 dengan capaian 101,19 dengan kategori Sangat Tinggi.

Sasaran 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
------------------	--

Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam sasaran strategis. Hal ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sasaran ini didukung dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Harapannya, OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).



Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 diukur dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.51 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A (80,54)	A (81,47)	101,15	Sangat Tinggi

Di lihat dari tabel di atas bahwa capaian indikator kinerja yaitu nilai AKIP sudah tercapai 101,15% dengan kategori Sangat Tinggi.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 diperoleh dari komponen sebagai berikut :

Tabel 3.52 Capaian Komponen Pembentuk

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
					Nilai	Kategori
	30%	30%	15%	25%		
2024	25,56	24,27	12,21	18,50	80,54	A
2025	25,80	24,00	12,75	18,92	81,47	A

Sumber : DKP, 2025



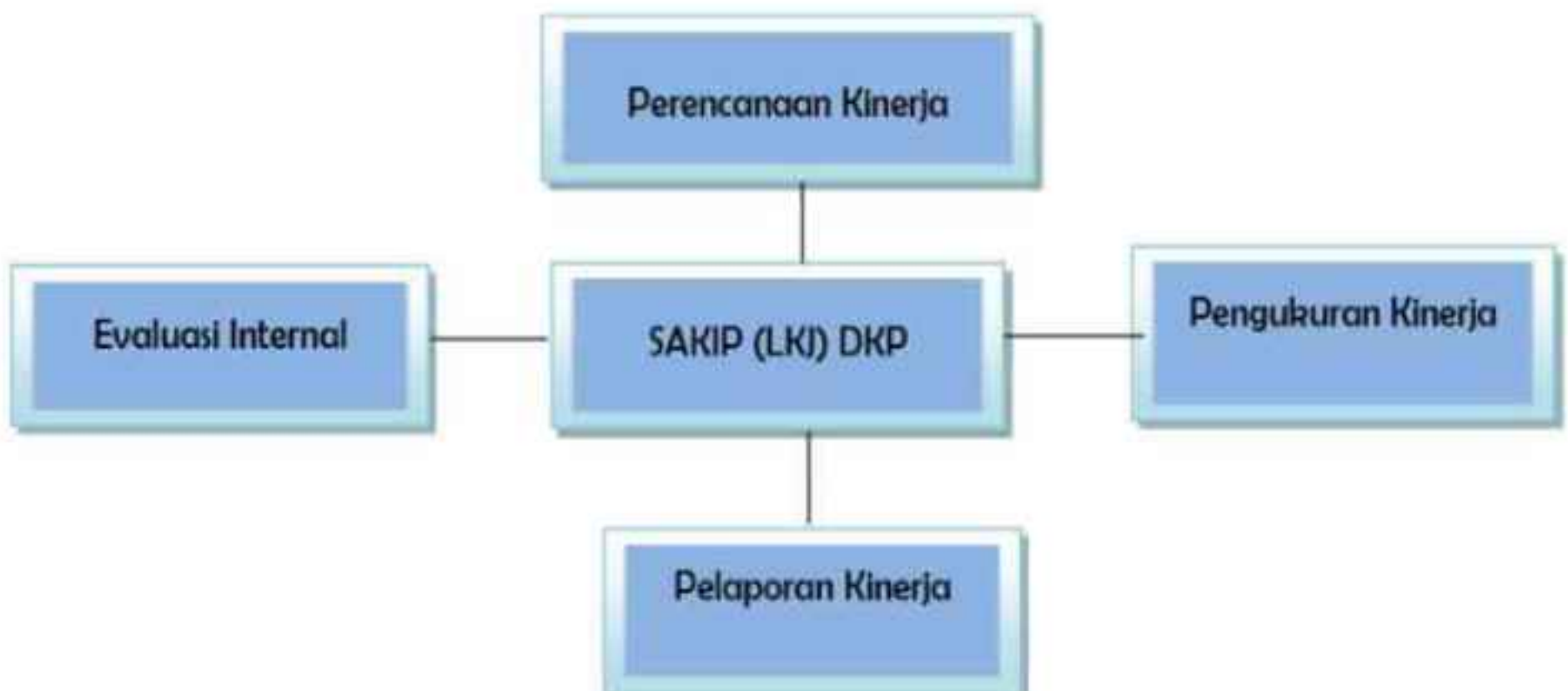
Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP. Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 4 komponen :

1. Komponen pertama adalah : perencanaan kinerja yang terdiri dari Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.
2. Komponen kedua adalah : pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.
3. Komponen ketiga adalah : pelaporan kinerja yang terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.
4. Komponen ke empat adalah : evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi

Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 nilai A (80,54%) berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi sebesar 81,47% dengan capaian sebesar 101,15 (Sangat Tinggi).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja masih perlu peningkatan nilai akuntabilitas kinerja khususnya terkait pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian kinerja.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 ditargetkan A (80,54%). Penilaian AKIP ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat hal ini dapat dilihat dari uraian di bawah ini :





Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tersebut, setiap tahun dilakukan oleh Tim Inspektorat.

Hal ini juga dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021,2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

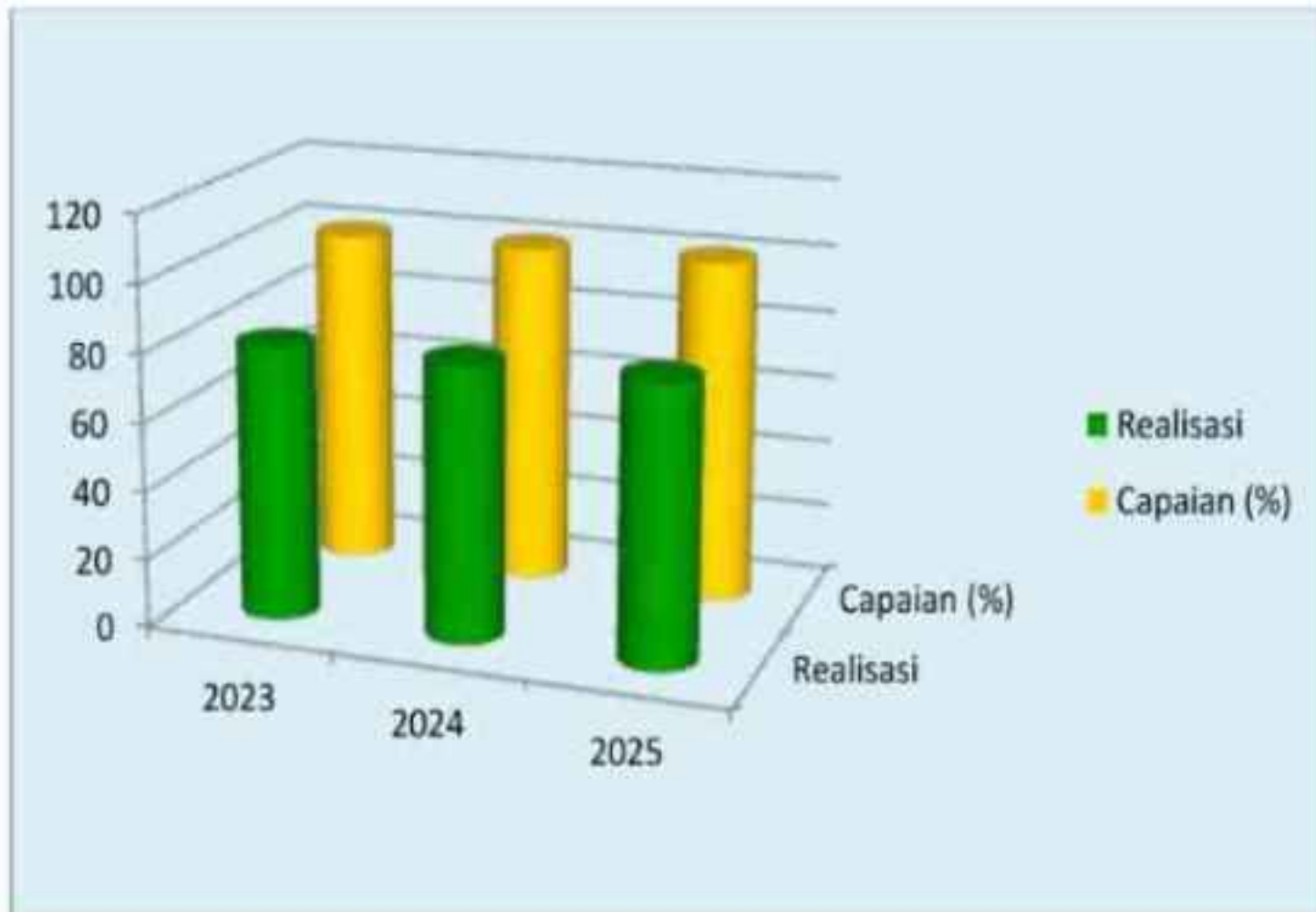
- Tahun 2021, target kinerja predikat A (80,10) dan realisasinya predikat A (81,21) dengan capaian 101,39%.
- Tahun 2022, target kinerja predikat A (80,12) dan realisasinya predikat A (80,06) dengan capaian 99,93%
- Tahun 2023, target kinerja predikat A (80,15) dan realisasinya predikat A (80,22) dengan capaian 100,09%
- Tahun 2024, target kinerja predikat A (80,16) dan realisasinya predikat A (80,54) dengan capaian 100,47%
- Tahun 2025, target kinerja predikat A (80,54) dan realisasinya predikat A (81,47) dengan capaian 101,15%

Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tabel.3.53 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,15	80,16	80,54	80,22	80,54	81,47	100,09	100,47	101,15

Jika dilihat dari indikator kinerja, nilai evaluasi akintabilitas kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai 2025, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.54 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	81,47	80,20	101,58

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2025 sebesar 81,47 telah mencapai 101,58% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80,20. Capaian ini dengan kriteria Sangat Tinggi.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan kinerja fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

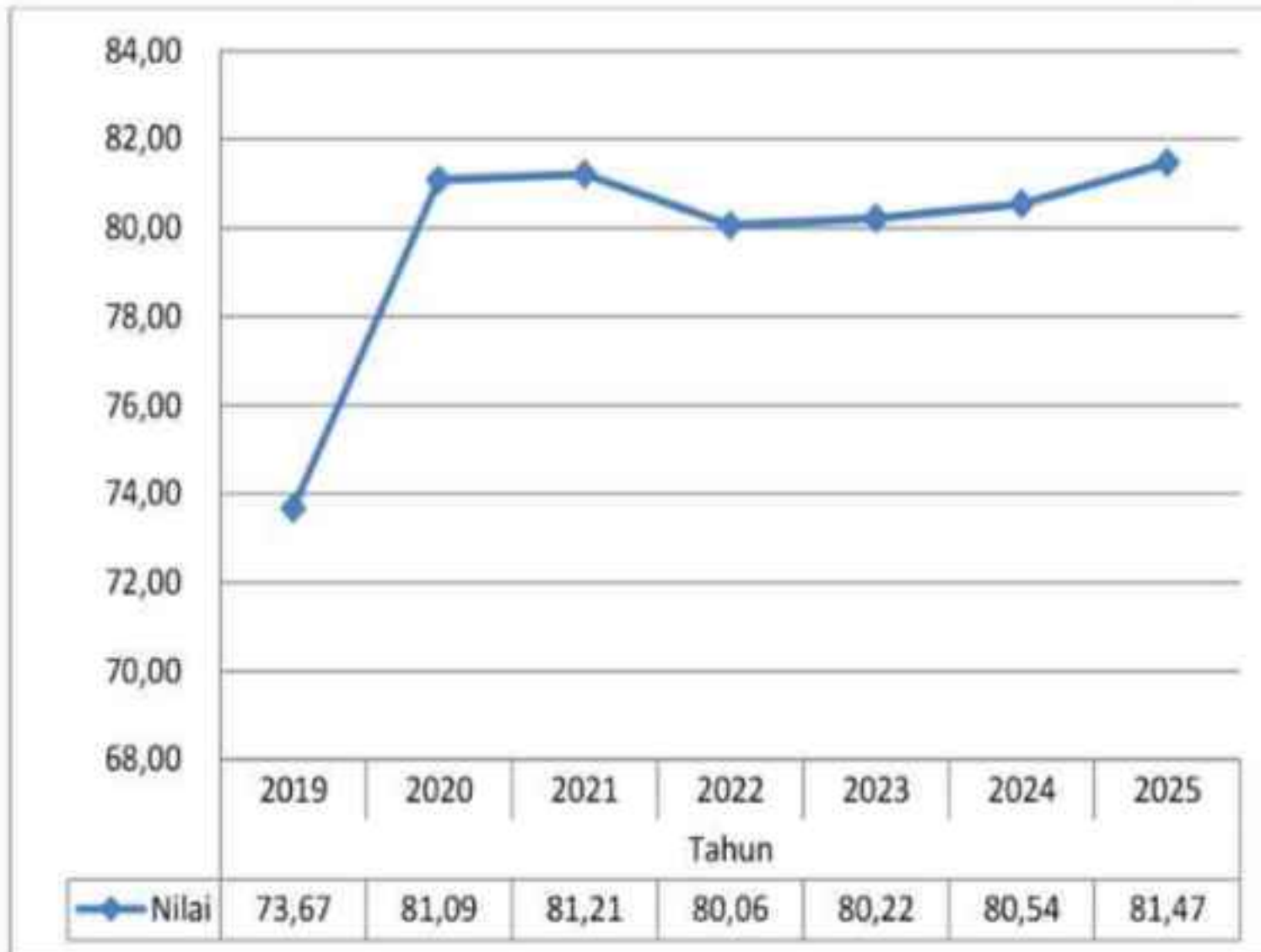
Tabel 3.55 Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,67	81,09	81,21	80,06	80,22	80,54	81,47

Sumber : DKP, 2025



Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 7,42, kemudian pada tahun 2025 sebesar 0,93 dan terendah terjadi penurunan di tahun 2022 sebesar 1,15. Perkembangan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2025 digambarkan pada grafik :



Dari grafik di atas secara umum, nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tren meningkat dan relatif stabil pada kategori baik selama periode 2019-2025. Nilai awal pada tahun 2019 sebesar 73,67 kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 81,09, dan selanjutnya berada pada kisaran 80-81 hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kinerja, perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi mengalami perbaikan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 dan mampu dipertahankan secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2020-2021 nilai relatif stabil dengan sedikit peningkatan menjadi 81,21. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan mulai terkonsolidasi dan dipertahankan secara konsisten. Tahun 2021-2022 terjadi penurunan kecil dari 81,21 menjadi 80,06. Penurunan ini masih dalam batas wajar dan dapat disebabkan oleh faktor evaluasi indikator kinerja, perubahan kebijakan, atau penyesuaian target kinerja.

Pada tahun 2022-2024 nilai kembali menunjukkan tren peningkatan bertahap, dari 80,06 menjadi 80,22 pada 2023 dan 80,54 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Dan di tahun 2024- 2025 nilai meningkat kembali menjadi



81,47, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pengamatan. Hal ini menandakan adanya penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kepedulian mulai dari level pimpinan sampai dengan staf.

Secara keseluruhan, realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang positif dan stabil. Peningkatan signifikan pada awal periode diikuti dengan stabilitas nilai pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan kepedulian seluruh staf agar nilai akuntabilitas dapat terus meningkat menuju kategori yang lebih tinggi.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.56 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025	Ket (+/-)
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	81,47	-	+

Sumber : DK_2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar 81,47% dengan tingkat capaian 101,15% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, terutama Pimpinan Unit Kerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi



4. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
5. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
7. Sumber daya Manusia yang kompeten dan professional
8. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan
9. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi dan transparan, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa, keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan barang inventaris
10. Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
11. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
12. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kinerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kinerjanya kurang baik

Adapun ***hambatan***/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
2. Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.



Rencana tindak lanjut dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Memperkuat komitmen para pimpinan unit kerja.
2. Perbaiki renstra (penyempurnaan indikator program dan kegiatan) dan cascading beserta crosscutting.
3. Sosialisasi dan pembinaan tentang penerapan sakip pada unit kerja.
4. FGD dalam rangka penentuan indikator kinerja, target kinerja, monitoring kinerja dan evaluasi kinerja internal baik pada tataran eselon II sd staf
5. FGD dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kinerja dengan anggaran.
6. Membangun aplikasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun sistem monitoring anggaran untuk efisiensi dan refocussing anggaran.
8. Evaluasi upaya pencapaian kinerja secara berjenjang per triwulan.
9. Monitoring dan evaluasi kinerja asn per triwulan.
10. Penyusunan rencana aksi eselon II hingga pejabat pelaksana/staf.
11. Melaksanakan perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim evaluasi SAKIP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi* dengan Indikator Kinerja Sasaran *Nilai akuntabilitas kinerja OPD* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 3.57. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal



Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih dibutuhkannya penambahan anggaran	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(29.912.453.961 \times 101,15\%) - 28.959.861.008}{28.959.861.008} \times 100\% \\ &= 0,04. \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi 0,04 maka **nilai efisiensi** adalah **60,84%**.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi 0,04 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD, diperoleh nilai efisiensi 60,84% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.



Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar Rp. 29.912.453.961,- dan terealisasi Rp. 28.959.861.008,- (96,82%).

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 6 sebagai tabel berikut :

Tabel 3.58 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 6

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	6	29.912.453.961	28.959.861.008
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	29.912.453.961	28.959.861.008

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.912.453.961	28.959.861.008	96,82	100	952.592.953
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.420.553.037	20.825.571.222	97,22	100	594.981.815
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.745.163.037	20.273.535.222	97,73	100	471.627.815
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675.390.000	552.036.000	81,74	100	123.354.000
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.377.825.464	2.330.695.920	98,02	100	47.129.544
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	1.250.000	1.245.000	99,6	100	5.000
3.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.250.000	1.228.000	98,24	100	22.000
3.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	750.000	750.000	100	100	0
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.511.925	2.496.000	99,37	100	15.925



3.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW II]	10.000.000	10.000.000	100	100	0
3.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	2.169.200	2.169.200	100	100	0
3.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	2.950.000	2.948.875	99,96	100	1.125
3.8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	2.612.719	2.612.700	100	100	19
3.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW I]	20.000.000	12.100.000	60,5	100	7.900.000
3.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.995.000	99,94	100	5.000
3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW III]	300.000	300.000	100	100	0
3.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD BPBALP]	1.125.000	1.125.000	100	100	0
3.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.500.000	1.485.000	99	100	15.000
3.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPMHP]	250.000	250.000	100	100	0
3.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW I]	65.000.000	64.870.000	99,8	100	130.000
3.16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW II]	69.459.500	69.141.600	99,54	100	317.900
3.17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW III]	78.393.200	76.886.100	98,08	100	1.507.100
3.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD BPBALP]	65.145.500	64.793.800	99,46	100	351.700
3.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD KPSDKP]	99.772.474	99.740.000	99,97	100	32.474
3.20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPMHP]	67.500.000	67.400.900	99,85	100	99.100
3.21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	100	0
3.22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.000.000	1.980.000	99	100	20.000
3.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	4.748.000	4.748.000	100	100	0
3.24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.306.412	135.007.762	78,81	100	36.298.650
3.25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.015.000	26.928.200	99,68	100	86.800



3.26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.652.816.534	1.652.494.783	99,98	100	321.751
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.169.000	95.705.000	96,51	100	3.464.000
4.1	Pengadaan Mebel	13.435.000	12.500.000	93,04	100	935.000
4.2	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW I]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
4.3	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW II]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
4.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	20.070.000	18.475.000	92,05	100	1.595.000
4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.950.000	99,38	100	50.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.431.441.460	5.162.808.549	95,05	100	268.632.911
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW I]	300.150.000	182.944.063	60,95	100	117.205.937
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW II]	730.000.000	727.373.543	99,64	100	2.626.457
5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW III]	150.000.000	94.563.331	63,04	100	55.436.669
5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPMHP]	72.652.090	65.465.900	90,11	100	7.186.190
5.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100	100	0
5.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.020.000	283.013.280	95,93	100	12.006.720
5.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD BPBALP]	251.000.000	240.304.816	95,74	100	10.695.184
5.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD KPSDKP]	164.335.000	157.490.198	95,83	100	6.844.802
5.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.466.034.370	3.409.403.418	98,37	100	56.630.952
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.465.000	391.934.183	95,72	100	17.530.817
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW I]	14.475.000	11.866.365	81,98	100	2.608.635
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW II]	10.975.000	10.694.500	97,44	100	280.500



6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW III]	2.300.000	2.300.000	100	100	0
6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPMHP]	6.800.000	6.797.000	99,96	100	3.000
6.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW II]	25.000.000	24.790.000	99,16	100	210.000
6.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW III]	6.080.000	3.660.000	60,2	100	2.420.000
6.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD KPSDKP]	5.000.000	4.925.000	98,5	100	75.000
6.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPMHP]	5.000.000	5.000.000	100	100	0
6.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.250.000	134.790.465	97,5	100	3.459.535
6.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD BPBALP]	24.325.000	23.297.050	95,77	100	1.027.950
6.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD KPSDKP]	82.620.000	82.003.760	99,25	100	616.240
6.12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	17.665.000	98,52	100	265.000
6.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000	772.643	85,85	100	127.357
6.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	25.000.000	24.998.000	99,99	100	2.000
6.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	30.000.000	23.650.400	78,83	100	6.349.600
6.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.810.000	9.725.000	99,13	100	85.000
6.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	5.000.000	4.999.000	99,98	100	1.000



Dari jumlah anggaran sebesar Rp 29.912.453.961,- terealisasi sebesar Rp 28.959.861.008,- (96,82%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 952.592.953,- (3,18%) yang merupakan sisa penyesuaian gaji dan TPP, penyesuaian honor, sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah, sisa kontrak dan lain-lain. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi (101,15%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,82%) dengan tingkat efisiensi 0,04.

Anggaran sebesar Rp. 29.912.453.961,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 Kegiatan dan 60 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 60 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi*.

Sasaran 7	Meningkatnya Kepuasan terhadap pelayanan organisasi
------------------	--

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan organisasi mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, baik masyarakat, mitra kerja, maupun internal organisasi. Kepuasan ini tidak hanya menjadi indikator kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola dan profesionalisme aparatur.

Peningkatan kepuasan pelayanan umumnya didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain perbaikan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan mudah dipahami, peningkatan kompetensi dan sikap pelayanan aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat dan mempermudah proses layanan. Selain itu, transparansi informasi, kepastian waktu layanan, dan kejelasan biaya juga berperan penting dalam membangun kepercayaan pengguna layanan.



Di sisi lain, organisasi yang responsif terhadap masukan dan pengaduan masyarakat cenderung mampu meningkatkan kualitas layanannya secara berkelanjutan. Mekanisme evaluasi rutin, survei kepuasan pengguna, serta tindak lanjut atas keluhan menjadi sarana penting untuk memastikan pelayanan terus mengalami perbaikan. Dengan meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan organisasi, diharapkan kepercayaan publik semakin kuat, citra organisasi semakin positif, dan kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Hal ini pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.59 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
		2025	2025	2025
1. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	84	85	101,19

Sumber : DKP,2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” adalah sebesar 101,19% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Untuk penentuan target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 didasarkan kepada target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	82	82	82.5	83	84	85

Pelaksanaan survey menggunakan kuisisioner diisi menggunakan google form dengan link sebagai berikut: <https://sepakat.sumbarprov.go.id>, dimana kuisisioner dibagikan ke Dinas Kab/Kota,UPTD, instansi terkait dan relasi.

Silahkan isi data diri Anda

Sistem Berakad hanya memiliki data anda sebagai bahan referensi survey.

NIK Nama Lengkap

Ura Email

Jenis Kelamin Pendidikan

Pekerjaan

Unit Kerja yang Dinda

Survey kepuasan masyarakat pada unit layanan dipilih berdasarkan instansi, UPTD, umur, jenis kelamin.



➤ Pengolahan Data

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam penghitungan IKM terdapat 9 unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKM (sebelum konversi)} \times 25$$

Adapun nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan publik digambarkan dalam tabel berikut:

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang Digunakan untuk pengukuran Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
88,31-100,00	A	Sangat Baik
76,61-88,30	B	Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
25,00-64,99	D	Tidak Baik

Hasil penilaian pelayanan melalui kuisisioner dengan 9 unsur pelayanan kepada 94 responden dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Hasil dari penilaian pada 9 (Sembilan) unsur tersebut memiliki nilai 85 dimana nilai ini mencerminkan pelayanan tergolong **BAIK**. Tentunya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan upaya *Service Excelent* mampu meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat melalui kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat.

Berikut kami lampirkan hasil pengolahan data survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :



PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2025

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1371064309520001	Reka Soesanti	5	4	4	4	4	4	4	3	4
2	1509044309040002	Mona Bela Agustia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	1301024811030001	Nadia Sirahtma Yani	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	1301024511040005	Wulan Rahmadania	4	3	3	3	4	3	4	3	4
5	1309056509040001	ELRICA DIVA SYEFANTI	4	4	3	2	4	4	4	3	4
6	1306056911020001	Sherly Ramadani	4	3	3	4	3	3	3	3	3
7	1402025709020002	PUSPITA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	1471026101040001	Malika Azzahra Wini	4	3	3	3	3	3	3	3	3
9	1308056910030002	Laila Mensa Alma	3	3	4	3	3	3	2	4	3
10	1371114806970005	Puja hemasifa M	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	1312110604040001	jordy ibereanda	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	1304040911020002	Fadi Ramadhan	3	3	4	4	3	3	3	3	4
13	1312016811010004	Silvi Ramadani	4	3	3	3	3	3	3	2	2
14	1374026504880001	Astri silvera	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	5205010105900005	Muhammad subarn	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	1706040808040001	Tio Vani Cahyadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	085365427181	Rendi Saputra	4	3	3	3	3	3	3	3	3
18	081363320648	Nirudesi Royya	4	4	4	3	4	4	4	3	4
19	082286266350	Viona malmonka	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	082288835752	PUJA LAILATUL RAHM	3	3	3	3	3	3	3	3	4
21	082288418406	Gita Oktavia, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	082172074130	kram maulana andi	4	3	3	3	4	4	4	4	4
23	082374283013	mhd fahar igal rambe	4	4	4	4	4	4	4	3	4
24	086527975159	Tn adnan riva	4	4	3	4	4	4	4	4	4
25	081266916350	Fadil Rahuna	4	4	3	3	3	4	4	4	4
26	082288151025	MAROHAM	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	081266053503	Muhammad Fiqri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	080271672165	Purnama sari	4	4	4	4	3	4	4	3	4
29	0899602495379	Nastwa Maulina	2	3	3	3	4	4	4	3	4
30	087848453706	Maria Magdalena Simahupang	4	4	4	3	3	3	3	3	4
31	085364622223	Cherly Areska, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	2	3
32	085373301131	prabai handriani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	082349893080	Azm eka putra	3	3	3	3	3	3	3	3	4



No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	082174323795	Iwan	1	4	4	4	4	4	4	3	4
35	082286060056	Jairul	4	4	4	3	4	4	4	4	3
36	081268539118	Adinda Tri DZ	4	3	4	4	4	4	4	4	4
37	083195801101	Warhamni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	081374565325	yonyea oktaviandra	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	081374455656	Rusdal labri	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	081275246972	Gusna Elita	3	3	2	4	3	3	3	2	3
41	082210312482	Mira Eka putri	4	2	4	3	2	3	3	4	4
42	081374120877	Sonni olivia	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	082285210681	Art Putra Guci	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	085263001875	FAHDA ISWAHYUDI	3	2	4	4	3	4	3	3	4
45	+6282174502440	RIRI HANDONI	3	3	3	4	3	4	4	4	4
46	081376199713	REVELLY JUNAN	1	1	2	4	3	3	3	3	3
47	082170962071	Syarif Hidayatullah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	08126718e57	Nazrizal	3	3	3	4	3	3	3	2	2
49	1306080902850002	Dodi Nopika	3	3	3	4	3	3	3	3	3
50	08116690921	Dr Mareta Kemala Sari, MM	4	4	4	4	4	4	4	2	4
51	085263341111	Lolly oktana	4	4	3	4	3	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	082169881958	Nelli sumarni	3	4	1	1	4	3	4	4	4
53	081258895358	Fansal Oktavi Hidayat	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	082386613177	Ramah Yani	3	3	3	4	3	3	3	2	3
55	081363396557	NURZAM,S.PI	3	4	3	4	3	3	3	3	4
56	081268754080	Muhammad Ibrahim	4	4	3	4	3	4	4	3	4
57	082283966147	Phansa Nabila Rizvi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	082288477127	Ridwan	2	3	3	2	2	3	3	2	2
59	085219717575	Ergis	3	3	3	4	3	3	3	3	3
60	082287816735	agus hendriyandani	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	081374469671	Yose Rizal Anwar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	082173523700	Tetmarlina	3	3	3	4	3	3	3	2	4
63	081374301639	Chani prwati	4	3	4	3	3	3	4	3	4
64	081274795390	Silpia Darista	3	4	4	3	4	4	4	4	4
65	08126159896	Yosy Novita, S.PI	3	3	3	4	3	3	3	3	4
66	082286335981	omnicon yosi putra	4	3	3	3	3	3	4	3	3
67	082387454798	HARIDMAN	3	3	3	4	3	3	4	3	4
68	085374827755	Virgadios Artatos	3	3	3	3	3	3	3	3	4
69	085173220937	Agung Prakama	4	4	2	4	4	4	4	4	4



No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
70	085270707607	Nada Amalina Daniel	4	3	3	3	3	3	4	4	4
71	085271732980	Yuwanda Iham	5	3	3	3	3	3	3	3	3
72	085274246304	Agung Putra Utama	4	3	4	4	4	4	4	4	4
73	081363856630	Iham	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	081276377377	Rido Mula Pratama	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	082256537866	Formes	3	3	3	3	3	3	3	3	3
76	0895613420114	Deden Kumawan	2	3	2	2	2	3	3	2	3
77	089620499331	Melody Virginia	3	3	3	3	3	3	3	3	4
78	082112403349	Maulid Alw	3	3	3	3	3	3	3	2	3
79	085263296630	Agus Salim, SH	5	3	3	4	3	4	3	3	4
80	081378746608	DENI SUSANTI	4	4	3	4	3	3	3	4	4
81	089669147947	Tio	3	3	3	3	3	3	3	3	4
82	083897818443	Az Zahra Khasratul Ummah	4	4	2	4	4	4	4	3	4
83	083826729078	Tri nanda prafel	3	3	4	3	3	4	3	3	4
84	081268584672	Mutiara Febri Yusida	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	083193090690	Anisa Agusti	4	4	3	3	2	4	4	4	4
86	085766307327	Martina Rhesly	4	3	3	4	4	4	4	4	4
87	083879487287	Dinda Putri Dwira	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
88	089529994292	Gading Neylathu Nufus	4	3	4	4	4	4	3	4	4
89	083801050254	Riska Aulia Putri	3	3	3	3	3	4	3	4	4
90	082264321509	Jihan Aniska	4	3	4	4	3	3	4	4	4
91	085273618947	Lata yarma putri	4	3	3	3	4	3	4	3	3
92	083801763698	Faisal	4	4	4	3	3	3	3	3	3
93	082173002058	Rivadi Hidayat	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	081364256380	Dina Eka Agustri	4	3	3	4	4	4	3	4	4
Total			325	316	312	327	315	327	328	310	343
NRR			3.46	3.36	3.32	3.48	3.35	3.48	3.49	3.3	3.65
NRR Terbang			0.38	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.4
IKM			3.39								
Konversi IKM			84.75								
Nilai Layanan			B: Baik								



Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan	U1	Persyaratan	3,46
NRR	Nilai rata-rata	U2	Prosedur	3,36
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Pelayanan	3,32
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi	U4	Biaya/Tarif	3,48
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0,111 per unsur	U5	Produk Layanan	3,35
		U6	Kompetensi pelaksana	3,48
		U7	Perilaku pelaksana	3,49
		U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,3
		U9	Sarana dan Prasarana	3,65

IKM UNIT PELAYANAN	
Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

NILAI IKM	Nama Layanan
85	Jumlah : 94 Orang
	Jenis Kelamin : L = 44 orang / P = 50 orang
	Pendidikan : SD = 0 orang
	SMP = 0 orang
	SMA = 14 orang
	DIII = 2 orang
	S1 = 64 orang
	S2 = 10 orang
	S3 = 1 orang
	Periode : 01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja

Tabel.3.60 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	83	84	83	85	100	101,19

Sumber : Data survey DKP



Jika dilihat dari indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha meningkatkan pelayanan guna kepuasan masyarakat.



Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.61 Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026
1.	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85	85	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 sebesar 85 dengan capaian sebesar 100% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 85.

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja 4 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan kinerja fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 3.62 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82	86,65	83	85

Sumber : DKP, 2025

Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 4,65, kemudian pada tahun 2025 sebesar 2,0 dan terendah terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 3,65. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2025 digambarkan pada grafik :



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa secara umum, tingkat kepuasan pelayanan organisasi menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan nilai yang relatif tinggi, yaitu berada pada kisaran 82-86,65. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh organisasi telah mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan atau pengguna layanan. Meskipun demikian, grafik menunjukkan adanya fluktuasi nilai dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa kualitas pelayanan mengalami peningkatan maupun penurunan pada periode tertentu.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 3,65 poin. Penurunan tingkat kepuasan pelayanan organisasi pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan. **Pertama**, adanya peningkatan ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, sehingga standar penilaian menjadi lebih tinggi



dibandingkan tahun sebelumnya. **Kedua**, kemungkinan terjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, peningkatan jumlah permintaan layanan, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan program baru yang memerlukan proses adaptasi. **Ketiga**, perubahan atau pembaruan sistem pelayanan yang sedang dalam tahap implementasi juga dapat sementara waktu mempengaruhi kenyamanan atau kecepatan layanan. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan pada tahun 2025 nilai kepuasan kembali meningkat, yang menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan tren yang terlihat:

- a. Tingkat kepuasan pelayanan organisasi berada pada kategori tinggi.
- b. Organisasi mampu meningkatkan kepuasan secara signifikan pada tahun 2023.
- c. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024, nilai kembali meningkat pada tahun 2025, menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Secara keseluruhan, realisasi tingkat kepuasan pelayanan organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja pelayanan yang baik dengan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Fluktuasi yang terjadi mencerminkan dinamika dalam penyelenggaraan pelayanan, namun organisasi tetap mampu menjaga tingkat kepuasan pada level yang tinggi. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, seperti penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan agar tingkat kepuasan dapat terus meningkat dan lebih stabil.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.63 Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025	Ket (+/-)
1.	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	85	-	+

Sumber : DK,2025



Untuk realisasi indikator Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan nasional dan provinsi karena ketidaksamaan indikator kinerja.

Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi nilai 85 dengan tingkat capaian 101,19%. Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sangat baik.

Upaya peningkatan Kinerja pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pelayanan *Service Excellent*.
2. Struktur kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendorong terwujudnya sistem pelayanan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
5. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
6. Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan prima.
7. Rekondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk pelayanan publik.

Dalam mendorong capaian tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi, ditemui beberapa ***hambatan*** yaitu :

1. Tujuan yang tidak jelas. Dimana alasan dalam pelaksanaan tugas tidak dijelaskan dengan baik sehingga pelaksana tidak mengetahui apa sebenarnya yang ingin dicapai.
2. Kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen. Dimana orang-orang di dalam organisasi kurang dapat belajar secara efisien dalam mengerjakan tugasnya dan kurang dapat meningkatkan hasil kinerjanya.
3. Kontrol yang tidak memadai , dimana keputusan yang buruk akan didapat karena informasi yang kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat pula.



4. Rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat. Dimana orang-orang yang direkrut kurang memiliki pengetahuan, kepribadian, atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Komunikasi yang tidak berjalan lancar . Visi organisasi tidak dimengerti, koordinasi antar anggota organisasi lemah, iklim organisasi rusak dan para pembuat keputusan kekurangan informasi.
6. Tim kerja yang tidak berjalan baik . Orang-orang di dalam organisasi yang seharusnya dapat bekerja sama tidak dapat menjalankan perannya dalam kelompok dan menemui banyak hambatan dalam bekerja sama.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan *upaya di masa yang akan datang* dalam pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Kelautan dan Perikanan menjadi SDM aparatur yang melayani.
2. Optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan penerapan *good governance*.
3. Pelayanan publik menerapkan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan standar kualitas pelayanan.
5. Membangun kualitas pelayanan serta memperbaiki manajemen pelayanan. Membangun budaya untuk adanya kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan harus melekat pada seluruh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi* dengan Indikator Kinerja *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi* diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan organisasi.
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.



Tabel 3.64. Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendorong tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Masih terdapat beberapa kekurangan jumlah SDM yang mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pencapaian sasaran strategis bisa optimal
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Penggunaan anggaran yang ada di maksimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih dibutuhkannya penambahan anggaran	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program
Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana yang ada sudah sangat memadai dalam mendukung kinerja	Masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang memadai	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat guna

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, dihitung dengan menggunakan rumus Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) yaitu :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{((PA \times CK) - RA)}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(29.912.453.961 \times 101,19\%) - 28.959.861.008}{28.959.861.008} \times 100\% \\ &= 0,04. \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:



$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%. Karena tingkat efisiensi 0,04 maka *nilai efisiensi* adalah **60,94%**.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa dengan tingkat efisiensi 0,04 dari penggunaan sumber daya terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja **meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**, diperoleh nilai efisiensi 60,94% dari ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang ada.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar Rp. 29.912.453.961,- dan terealisasi Rp. 28.959.861.008,- (96,82%).

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran 7 sebagai tabel berikut :

Tabel 3.65 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis 7

No	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	6	29.912.453.961	28.959.861.008
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	29.912.453.961	28.959.861.008

Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.912.453.961	28.959.861.008	96,82	100	952.592.953
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.420.553.037	20.825.571.222	97,22	100	594.981.815
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.745.163.037	20.273.535.222	97,73	100	471.627.815
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675.390.000	552.036.000	81,74	100	123.354.000



Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.377.825.464	2.330.695.920	98,02	100	47.129.544
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	1.250.000	1.245.000	99,6	100	5.000
3.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.250.000	1.228.000	98,24	100	22.000
3.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	750.000	750.000	100	100	0
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.511.925	2.496.000	99,37	100	15.925
3.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW II]	10.000.000	10.000.000	100	100	0
3.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	2.169.200	2.169.200	100	100	0
3.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	2.950.000	2.948.875	99,96	100	1.125
3.8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	2.612.719	2.612.700	100	100	19
3.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW I]	20.000.000	12.100.000	60,5	100	7.900.000
3.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.995.000	99,94	100	5.000
3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW III]	300.000	300.000	100	100	0
3.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD BPBALP]	1.125.000	1.125.000	100	100	0
3.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.500.000	1.485.000	99	100	15.000
3.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPMHP]	250.000	250.000	100	100	0
3.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW I]	65.000.000	64.870.000	99,8	100	130.000
3.16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW II]	69.459.500	69.141.600	99,54	100	317.900



Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
3.17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW III]	78.393.200	76.886.100	98,08	100	1.507.100
3.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD BPBALP]	65.145.500	64.793.800	99,46	100	351.700
3.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD KPSDKP]	99.772.474	99.740.000	99,97	100	32.474
3.20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPMHP]	67.500.000	67.400.900	99,85	100	99.100
3.21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	100	0
3.22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.000.000	1.980.000	99	100	20.000
3.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	4.748.000	4.748.000	100	100	0
3.24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.306.412	135.007.762	78,81	100	36.298.650
3.25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.015.000	26.928.200	99,68	100	86.800
3.26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.652.816.534	1.652.494.783	99,98	100	321.751
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.169.000	95.705.000	96,51	100	3.464.000
4.1	Pengadaan Mebel	13.435.000	12.500.000	93,04	100	935.000
4.2	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW I]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
4.3	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW II]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
4.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	20.070.000	18.475.000	92,05	100	1.595.000
4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.950.000	99,38	100	50.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.431.441.460	5.162.808.549	95,05	100	268.632.911
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW I]	300.150.000	182.944.063	60,95	100	117.205.937
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW II]	730.000.000	727.373.543	99,64	100	2.626.457



Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW III]	150.000.000	94.563.331	63,04	100	55.436.669
5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPMHP]	72.652.090	65.465.900	90,11	100	7.186.190
5.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100	100	0
5.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.020.000	283.013.280	95,93	100	12.006.720
5.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD BPBALP]	251.000.000	240.304.816	95,74	100	10.695.184
5.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD KPSDKP]	164.335.000	157.490.198	95,83	100	6.844.802
5.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.466.034.370	3.409.403.418	98,37	100	56.630.952
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.465.000	391.934.183	95,72	100	17.530.817
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW I]	14.475.000	11.866.365	81,98	100	2.608.635
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW II]	10.975.000	10.694.500	97,44	100	280.500
6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW III]	2.300.000	2.300.000	100	100	0
6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPMHP]	6.800.000	6.797.000	99,96	100	3.000
6.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD PPW II]	25.000.000	24.790.000	99,16	100	210.000
6.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW III]	6.080.000	3.660.000	60,2	100	2.420.000
6.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD KPSDKP]	5.000.000	4.925.000	98,5	100	75.000



Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		Fisik %	
			Rp	%		
6.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPMHP]	5.000.000	5.000.000	100	100	0
6.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.250.000	134.790.465	97,5	100	3.459.535
6.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD BPBALP]	24.325.000	23.297.050	95,77	100	1.027.950
6.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD KPSDKP]	82.620.000	82.003.760	99,25	100	616.240
6.12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	17.665.000	98,52	100	265.000
6.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000	772.643	85,85	100	127.357
6.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	25.000.000	24.998.000	99,99	100	2.000
6.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	30.000.000	23.650.400	78,83	100	6.349.600
6.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.810.000	9.725.000	99,13	100	85.000
6.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	5.000.000	4.999.000	99,98	100	1.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 29.912.453.961,- terealisasi sebesar Rp 28.959.861.008,- (96,82%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 952.592.953,- (3,18%) yang merupakan sisa penyesuaian gaji dan TPP, penyesuaian honor, sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah, sisa kontrak dan lain-lain. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi (101,19%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,82%) dengan tingkat efisiensi 0,04.



Anggaran sebesar Rp. 29.912.453.961,- berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 Kegiatan dan 60 sub kegiatan. Sub kegiatan ini mempunyai 60 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi*.

3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran APBD

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang didanai oleh APBD- Perubahan Provinsi Sumatera Barat terlaksana dari pagu dana sebesar Rp. 44.465.935.898,- terealisasi sebesar Rp. 42.438.641.156,- atau sebesar 95,44% dengan realisasi fisik sebesar 98,13%. Sisa anggaran Rp. 2.027.294.742,- terdiri dari :

1. Sisa gaji, sisa honorarium pengelola keuangan dan sisa listrik UPTD.
2. Sisa honor petugas lapang UPTD
3. Sisa kontrak
4. Sisa belanja kegiatan
5. Kegiatan yang tidak terlaksana.

Tidak terlaksananya fisik 100% karena adanya 3 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu :

1. Pengadaan Induk Ikan Mas **APBD (Rp.14.700.000,-)** dengan alasan tidak adanya ketersediaan Induk Ikan Mas di BPBAT Sungai Gelam, BBPBAT Sukabumi, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Subang.
2. Pengadaan Benih Bening Lobster **APBD-P (Rp.79.980.000,-)** dikarenakan ketersediaan benih lobster tidak ada karena cuaca ekstrim dan tergantung pada alam dan sudah dilakukan koordinasi dengan kelompok penangkap benih bening lobster dan sudah diupayakan ketersediaan tetapi tetap tidak tersedia.
3. Belanja Sisa Perencanaan 20% Pengadaan Pabrik Es DAK tahun 2024 **APBD-P (Rp.12.876.086,-)** yang tidak bisa dibayarkan karena pekerjaan Rehabilitasi Pabrik Es nya tidak dilaksanakan akibat gagal kontrak.



Berikut kami sajikan dalam tabel hubungan antara Sasaran dengan Pagu Anggaran dan realisasinya untuk mengetahui seberapa besar dukungan anggaran untuk masing-masing sasaran.

NO	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Program
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	7.151.355.724	6.852.263.585	95,82	Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	5.707.290.858	5.011.620.498	87,81	Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Meningkatnya Hasil Pemasaran Perikanan	124.303.760	111.872.960	90	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	669.712.000	647.336.005	96,66	
5	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	900.819.595	855.687.100	94,99	- Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil - Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	29.912.453.961	28.959.861.008	96,82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	29.912.453.961	28.959.861.008	96,82	
	Rata-rata			95,44	



NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi			Sisa Anggaran
			Keuangan		Fisik	
	Uraian		Nilai (Rp.)	%	%	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.912.453.961	28.959.861.008	96,82	100	952.592.953
1,1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.420.553.037	20.825.571.222	97,22	100	594.981.815
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.745.163.037	20.273.535.222	97,73	100	471.627.815
1.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	675.390.000	552.036.000	81,74	100	123.354.000
1,2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
1.2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.000.000	153.146.134	88,02	100	20.853.866
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.377.825.464	2.330.695.920	98,02	100	47.129.544
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	1.250.000	1.245.000	99,6	100	5.000
1.3.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.250.000	1.228.000	98,24	100	22.000
1.3.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	750.000	750.000	100	100	0
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.511.925	2.496.000	99,37	100	15.925
1.3.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW II]	10.000.000	10.000.000	100	100	0
1.3.6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	2.169.200	2.169.200	100	100	0
1.3.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD BPBALP]	2.950.000	2.948.875	99,96	100	1.125
1.3.8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - UPTD PPMHP]	2.612.719	2.612.700	100	100	19
1.3.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW I]	20.000.000	12.100.000	60,5	100	7.900.000
1.3.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.995.000	99,94	100	5.000
1.3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPW III]	300.000	300.000	100	100	0
1.3.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD BPBALP]	1.125.000	1.125.000	100	100	0
1.3.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD KPSDKP]	1.500.000	1.485.000	99	100	15.000
1.3.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan [UPTD - UPTD PPMHP]	250.000	250.000	100	100	0
1.3.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW I]	65.000.000	64.870.000	99,8	100	130.000
1.3.16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW II]	69.459.500	69.141.600	99,54	100	317.900
1.3.17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPW III]	78.393.200	76.886.100	98,08	100	1.507.100
1.3.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD BPBALP]	65.145.500	64.793.800	99,46	100	351.700
1.3.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD KPSDKP]	99.772.474	99.740.000	99,97	100	32.474



1.3.20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [UPTD - UPTD PPMHP]	67.500.000	67.400.900	99,85	100	99.100
1.3.21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100	100	0
1.3.22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW I]	2.000.000	1.980.000	99	100	20.000
1.3.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [UPTD - UPTD PPW III]	4.748.000	4.748.000	100	100	0
1.3.24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.306.412	135.007.762	78,81	100	36.298.650
1.3.25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.015.000	26.928.200	99,68	100	86.800
1.3.26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.652.816.534	1.652.494.783	99,98	100	321.751
1,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.169.000	95.705.000	96,51	100	3.464.000
1.4.1	Pengadaan Mebel	13.435.000	12.500.000	93,04	100	935.000
1.4.2	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW I]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
1.4.3	Pengadaan Mebel [UPTD - UPTD PPW II]	28.832.000	28.390.000	98,47	100	442.000
1.4.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	20.070.000	18.475.000	92,05	100	1.595.000
1.4.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	8.000.000	7.950.000	99,38	100	50.000
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.431.441.460	5.162.808.549	95,05	100	268.632.911
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW I]	300.150.000	182.944.063	60,95	100	117.205.937
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW II]	730.000.000	727.373.543	99,64	100	2.626.457
1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPW III]	150.000.000	94.563.331	63,04	100	55.436.669
1.5.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD PPMHP]	72.652.090	65.465.900	90,11	100	7.186.190
1.5.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	2.250.000	100	100	0
1.5.6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.020.000	283.013.280	95,93	100	12.006.720
1.5.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD BPBALP]	251.000.000	240.304.816	95,74	100	10.695.184
1.5.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - UPTD KPSDKP]	164.335.000	157.490.198	95,83	100	6.844.802
1.5.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.466.034.370	3.409.403.418	98,37	100	56.630.952
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.465.000	391.934.183	95,72	100	17.530.817
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW I]	14.475.000	11.866.365	81,98	100	2.608.635
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW II]	10.975.000	10.694.500	97,44	100	280.500



1.6.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPW III]	2.300.000	2.300.000	100	100	0
1.6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD PPMHP]	6.800.000	6.797.000	99,96	100	3.000
1.6.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	25.000.000	24.790.000	99,16	100	210.000
1.6.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD PPW III]	6.080.000	3.660.000	60,2	100	2.420.000
1.6.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - UPTD KPSDKP]	5.000.000	4.925.000	98,5	100	75.000
1.6.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPMHP]	5.000.000	5.000.000	100	100	0
1.6.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.250.000	134.790.465	97,5	100	3.459.535
1.6.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD BPBALP]	24.325.000	23.297.050	95,77	100	1.027.950
1.6.11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - UPTD KPSDKP]	82.620.000	82.003.760	99,25	100	616.240
1.6.12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.930.000	17.665.000	98,52	100	265.000
1.6.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000	772.643	85,85	100	127.357
1.6.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	25.000.000	24.998.000	99,99	100	2.000
1.6.15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW II]	30.000.000	23.650.400	78,83	100	6.349.600
1.6.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.810.000	9.725.000	99,13	100	85.000
1.6.17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - UPTD PPW I]	5.000.000	4.999.000	99,98	100	1.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695
2,1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695
2.1.1	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat [UPTD - UPTD KPSDKP]	448.614.745	410.990.050	91,61	100	37.624.695
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	7.151.355.724	6.852.263.585	95,82	99,82	299.092.139
3,1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.484.620.250	5.253.919.837	95,79	100	230.700.413
3.1.1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.484.620.250	5.253.919.837	95,79	100	230.700.413



3,2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	378.001.500	362.654.050	95,94	100	15.347.450
3.2.1	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	378.001.500	362.654.050	95,94	100	15.347.450
3,3	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1.288.733.974	1.235.689.698	95,88	99	53.044.276
3.3.1	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW I]	258.613.138	252.238.550	97,54	100	6.374.588
3.3.2	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW II]	921.432.750	905.157.848	98,23	100	16.274.902
3.3.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW III]	95.812.000	78.293.300	81,72	100	17.518.700
3.3.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan [UPTD - UPTD PPW I]	12.876.086	0	0	0	12.876.086
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.707.290.858	5.011.620.498	87,81	85,69	695.670.360
4,1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	466.949.618	443.656.228	95,01	100	23.293.390
4.1.1	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi [UPTD - UPTD BPBALP]	89.425.800	75.925.528	84,9	100	13.500.272
4.1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut [UPTD - UPTD BPBALP]	377.523.818	367.730.700	97,41	100	9.793.118
4,2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	5.240.341.240	4.567.964.270	87,17	84,41	672.376.970
4.2.1	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.159.919.240	4.491.735.270	87,05	84,17	668.183.970
4.2.2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD - UPTD KPSDKP]	80.422.000	76.229.000	94,79	100	4.193.000
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	452.204.850	444.697.050	98,34	100	7.507.800
5,1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	452.204.850	444.697.050	98,34	100	7.507.800
5.1.1	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	225.326.900	225.307.300	99,99	100	19.600
5.1.2	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi [UPTD - UPTD KPSDKP]	226.877.950	219.389.750	96,7	100	7.488.200
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	794.015.760	759.208.965	95,62	100	34.806.795
6,1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.303.760	111.872.960	90	100	12.430.800
6.1.1	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing [UPTD - UPTD PPMHP]	74.303.760	62.509.600	84,13	100	11.794.160



6.1.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	50.000.000	49.363.360	98,73	100	636.640
6,2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	669.712.000	647.336.005	96,66	100	22.375.995
6.2.1	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	669.712.000	647.336.005	96,66	100	22.375.995
Total		44.465.935.898	42.438.641.156	95,44	98,13	2.027.294.742

b. Realisasi Anggaran APBN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 mendapatkan dana alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Kementerian Kelautan RI Ditjen Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 7.700.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.659.570,- (99,48%) terkait dukungan manajemen kegiatan Rekonsiliasi BMN dan SAI tahun 2025.



04

PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mendukung pelaksanaan capaian target sasaran strategis tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp. 44.465.935.898,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.438.641.156,- (95,44%) dan realisasi fisik sebesar 98,13%. Serta alokasi dana APBN tahun 2025 sebesar Rp. 7.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp.7.659.570,- sebesar 99,48% dengan realisasi fisik 100%.

Rata-rata capaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama sebesar 93,95%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. Tujuh Sasaran dan Tujuh Indikator Kinerja yang diukur mendapat nilai bobot kategori **Sangat Tinggi dan Sangat Rendah** dari 7 indikator kinerja ada 4 indikator yang diatas 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator capaiannya 100% kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator capaiannya 92,32% **Sangat Tinggi** dan 1 indikator capaiannya 50% kategori **Sangat Rendah** yaitu nilai ekspor hasil perikanan, disebabkan karena banyak hasil perikanan lokal yang dikirim ke luar negeri melalui pelabuhan di luar Sumatera Barat (misal Jakarta) sehingga pencatatannya bukan atas nama Sumatera Barat, selain itu produksi yang masih bersifat musiman, ketergantungan pada cuaca, serta keterbatasan armada dan teknologi penangkapan menyebabkan volume dan kualitas pasokan sulit dipertahankan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar ekspor.

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 "Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. Target kinerja 1,11% terealisasi sebesar 1,20% dengan capaian 108,11% Sangat Tinggi.



2. Capaian sasaran strategis 2 "Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Target kinerja 0,51% terealisasi sebesar 0,51% dengan capaian 100% Sangat Tinggi.
3. Capaian sasaran strategis 3 "Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai ekspor Hasil Perikanan. Target kinerja 160 Milyar terealisasi sebesar 80 Milyar dengan capaian 50% Sangat Rendah.
4. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan. Target kinerja 2,05% terealisasi sebesar 2,15% dengan capaian 104,88% Sangat Tinggi.
5. Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan" dengan indikator kinerja yaitu ; Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Target kinerja 64,71% terealisasi sebesar 59,74% dengan capaian 92,32% Sangat Tinggi.
6. Capaian sasaran strategis 6 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD . Target kinerja A (80,54) terealisasi A (81,47) dengan capaian 101,15% Sangat Tinggi.
7. Capaian sasaran strategis 7 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu ; Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. Target kinerja B (84) terealisasi B (85) dengan capaian 101,19% Sangat Tinggi.

Secara umum sasaran-sasaran yang telah disusun dan rangka pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan persentase capaian 6 indikator yang Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan kategori Sangat Rendah, hal ini tentunya didukung dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, baik melalui dukungan APBD maupun APBN.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat masih ditemui sejumlah kendala/permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta penguasaan teknologi perikanan budidaya



- c. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan
- d. Masih belum terpenuhinya kebutuhan benih untuk usaha budidaya laut dan payau
- e. Masih rendahnya kemampuan manajerial usaha dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan
- g. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan baik dilaut maupun perairan umum
- h. Terjadinya degradasi ekosistem laut dan pesisir dan juga perairan umum
- i. Pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut maka solusi dan upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan sektor perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian bibit dan benih bersertifikat
2. Mengembangkan usaha - usaha ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
 - b. Pengembangan budidaya laut, payau dan komoditas perikanan lainnya.
3. Pengembangan *system value chain*, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
 - b. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan
 - c. Pengintegrasian program perikanan dan lingkungan hidup
4. Fasilitasi pembangunan industri hilir perikanan, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan

Dari kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2025 dari pelaksanaan kegiatan APBD dan APBN adalah :



1. Produksi Perikanan

Produksi (ton)	Tahun 2024	Tahun 2025	% Kenaikan
Perikanan Tangkap	236.044,75	238.876,74	1,08 %
Budidaya	262.809	264.153,80	0,51 %

* angka sementara

2. Tingkat Pendapatan Petani/Nelayan/tahun :

Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Nelayan	42.513.858	43.966.796	3,42%
Pembudidaya Ikan	54.526.870	54.619.240	0,17%

* angka sementara

3. Konsumsi Ikan kg/kapita/th

Konsumsi	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Konsumsi Ikan per kap/th	43,08	24,32	perhitungan baru

* angka sementara

4. Ekspor Komoditas Perikanan (Milyar)

Ekspor	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Ekspor Komoditas Perikanan	159,66	80	-49.89%

* angka sementara

5. Tercapainya PAD Provinsi Sumatera Barat

PAD	Tahun 2024	Tahun 2025	% Kenaikan
PAD	1.189.969.092	1.261.607.464	6,02 %

Sumber : DKP,2025

6. BBI dan UPR yang berserifikat CPIB

Sertifikat	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
BBI dan UPR	183	193	5,46%

Sumber : DKP,2025

7. Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang bersertifikat CBIB

Sertifikat	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
UPR	676	690	2,07%

Sumber : DKP,2025



8. Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang bersertifikat CPIB

Sertifikat	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Pokdakan	6	6	-%

Sumber : DKP,2025

9. Jumlah Nelayan Perikanan Laut

Nelayan Perikanan Laut	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Neyanan Perikanan Laut	45.779	46.650	1,90%

Sumber : DKP,2025

10. Jumlah Nelayan Perairan Umum

Nelayan Perairan Umum	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Neyanan Perairan Umum	22.154	22.154	-%

Sumber : DKP,2025

11. Jumlah Kelompok Usaha Bersama

KUB	Tahun 2024	Tahun 2025*	% Kenaikan
Jumlah KUB	1.033	1.033	-%

Sumber : DKP,2025

Dari hasil yang dicapai, masih banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa peningkatan sarana dan prasarana produksi bagi Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan, Peningkatan SDM Aparatur maupun Masyarakat Perikanan, Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Lain-lain.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah di capai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN



Kotak Pos . 42

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTOTINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25 128

Telp. (0751) 841584 (Kepala)
(0751) 27089 (Sekretariat)
(0751) 33288 (umum)
Fax. (0751) 27089

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.Ir.RETI WAFDA,M.Tp**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2025

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Dr.Ir.RETI WAFDA,M.Tp
NIP. 19670312 199308 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

TAHUN : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,11 %
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,51%
3.	Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	160
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,05 %
5.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	64,71 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,54)
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (84)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.912.453.961,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	448.614.745,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.151.355.724,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.707.290.858,-	APBD

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	452.204.850,-	APBD
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	794.015.760,-	APBD
7.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	7.700.000,-	APBN - TP

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

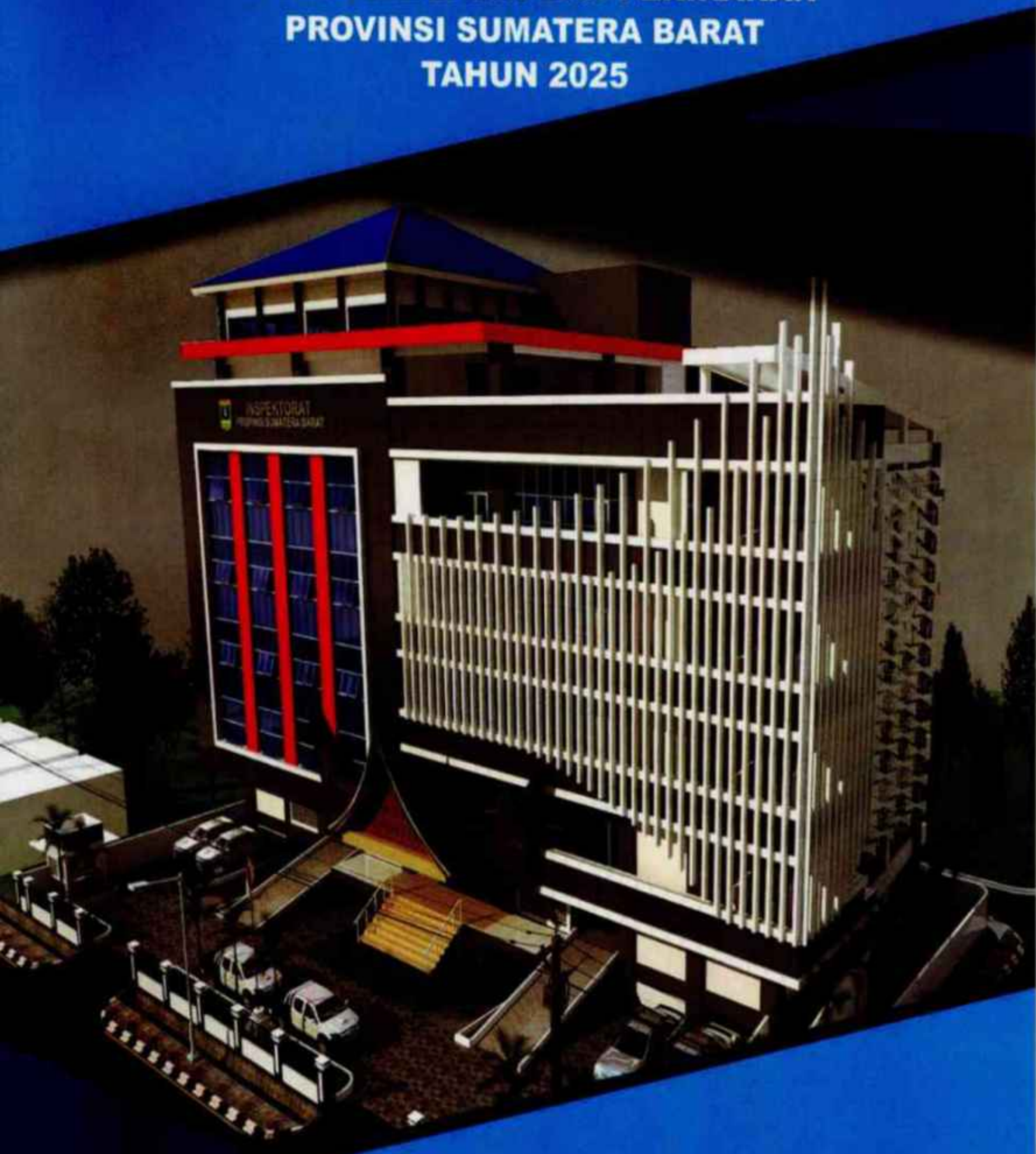


Dr. Ir. RETI WAFDA, M.Tp
NIP. 19670312 199308 2 001



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

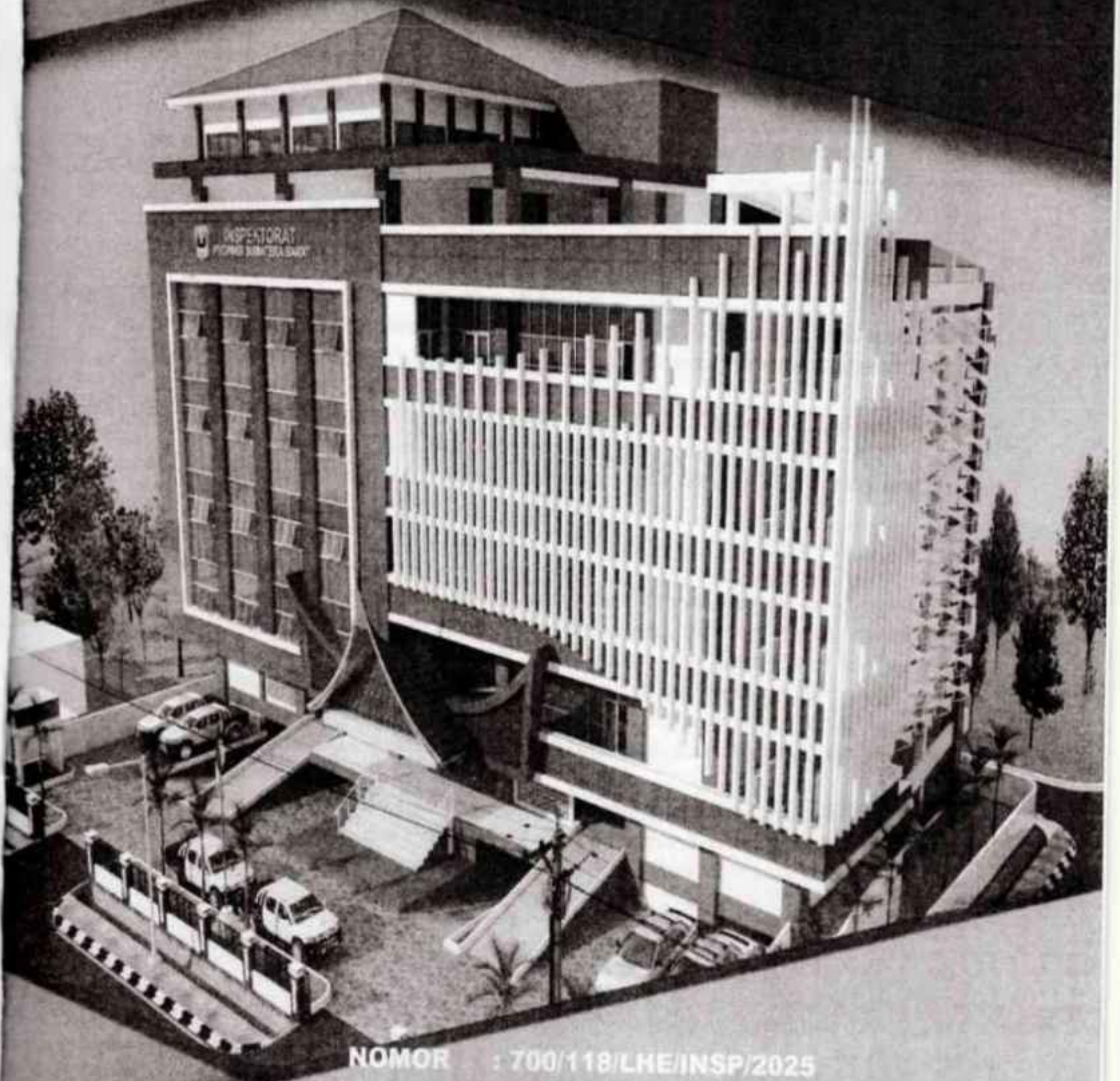
**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



**NOMOR : 700/118/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 24 JULI 2025**

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



NOMOR : 700/118/LHE/INSP/2025

TANGGAL : 24 JULI 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN : 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Keputusan Gubernur Nomor 700 - 177 - 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/110/INSP/V/2025 tanggal 19 Mei 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2025.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 19 Mei 2025 s.d 20 Juni 2025.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Andri Yulika |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Alfianori |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Fakhru Rozi
2) Jelita Alamsyah
3) Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : 1) Khairul
2) Gerhana Bulan Butet Lubis
3) Yanti Jasvia
4) Ranita Jasman
5) Yunhesvo Melya
6) Viranita Arief
7) Jelly Nostiva
8) Egi Kurniawan
9) Mutia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan.
- Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas kelautan dan perikanan.
- Menyelenggarakan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperoleh **nilai 81,47** dengan **Kategori A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,80
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4.	Evaluasi Internal	25,00	18,92
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		81,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **25,80** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Renstra, RKT, PK dan IKU sudah diformalkan dan sudah dipublikasikan
- b. Tujuan/Sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran dan target telah memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevan dan terukur*).
- c. Target yang ditetapkan dalam PK telah tercapai dengan baik (*on the right track*).
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut
 - 1) Masih terdapat sasaran strategis pada cascading yang tidak selaras dengan perjanjian kinerja di tingkat eselon III yaitu "Meningkatnya kapasitas kelompok nelayan" yang belum ada pengampunya.
 - 2) Rencana aksi dan realisasi rencana aksi belum dianalisa untuk penyempurnaan aktivitas dalam pencapaian kinerja.
 - 3) Tidak ada penyempurnaan target indikator sasaran terhadap capaian tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **24,00** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan)
- b. Data kinerja telah relevan untuk mengukur capaian kinerja
- c. Indikator kinerja utama Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan telah menyajikan definisi operasional jelas untuk mengukur target yang diperjanjikan.
- d. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja yaitu:
 - 1) Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak tercapai dengan persentase capaian < 50% dan terdapat 5 (lima) dari 7 (tujuh) indikator sasaran yang capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
 - 2) Belum ada *punishment* terhadap indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai target yang diperjanjikan.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **12,75** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja sudah disusun sesuai standar, diformalkan, direviu dan dipublikasikan.
- b. Laporan Kinerja sudah menginfokan pencapaian kinerja, baik analisis maupun evaluasi realisasi dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut
 - 1) Informasi pelaporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan perhatian utama pimpinan dalam penyesuaian aktivitas,
 - 2) Informasi pelaporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam

penyesuaian perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian keberhasilan kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran akuntabilitas kinerja Internal sebesar 18,92 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan telah memanfaatkan teknologi informasi (Dashboard Pembangunan).
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyempurnaan Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Bukti pemantauan capaian kinerja internal yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjadi bukti bahwa terdapat pendalaman yang memadai untuk setiap capaian kinerja karena belum menyajikan data capaian, faktor pendorong, hambatan/kendala, rekomendasi dan evaluasi secara nyata pada pemantauan terhadap target atau aksi yang tidak tercapai
 - 2) Hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyelaraskan sasaran strategis pada cascading dengan perjanjian kinerja.
- b. Melakukan penyempurnaan target indikator kinerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- c. Menyesuaikan Rencana aksi yang telah dipantau secara berkala untuk perbaikan/penyempurnaan aktivitas dalam mewujudkan hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Meningkatkan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya untuk capaian kinerja lebih baik.
- b. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.
- c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *punishment* terhadap target kinerja yang tidak tercapai.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Informasi kinerja hendaknya dijadikan perhatian dan dimanfaatkan dalam penilaian serta perbaikan pelaksanaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- b. Informasi dalam laporan realisasi rencana aksi agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam pencapaian keberhasilan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melakukan pemantauan kinerja secara mendalam dan memadai dan menyajikan bukti pemantauan dengan bukti nyata terhadap data capaian kinerja, faktor pendorong, hambatan/kendala, rekomendasi dan evaluasi untuk hasil yang lebih baik.

- b. Memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Plt. INSPEKTUR,

ANDRI YULIKA, S.H., M.Hum., CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP.19721026 199703 1 003